



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN AKHIR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN BINTAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2016**

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BINTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2016**



- ❖ *Lingkar tali bersimpul lima berwarna coklat kekuning-kuningan melambangkan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila.*
- ❖ *Kolek berwarna kuning emas dan layar putih, mengandung arti penghidupan dan darah pelaut penduduk Kepulauan Riau.*
- ❖ *Gelombang tiga lapis berwarna putih, melambangkan geografis Kepulauan Riau.*
- ❖ *Gerana berwarna kuning kemerah-merahan, melukiskan adat-istiadat dan keramahan penduduknya.*
- ❖ *Huruf Arab "Alif" dan "Fa" berwarna hitam, melambangkan Bahasa Melayu Riau sumber utama Bahasa Indonesia.*
- ❖ *Mayang kelapa berwarna hijau kekuning-kuningan mengandung arti sumber kehidupan dan harapan dimasa depan.*
- ❖ *Selendang berwarna kuning emas bertulis semboyan : "Tak Berganjak Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing" mengandung makna kebesaran jiwa, kemuliaan dan semangat yang tak tergoyahkan serta semangat kebersamaan untuk membangun.*

KATA PENGANTAR

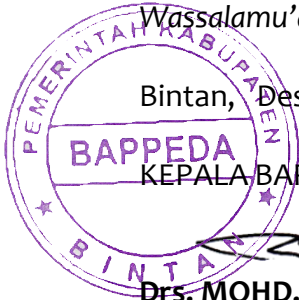
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Atas berkat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Bappeda bersama Tim Update Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bintan Tahun 2016 dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan 8 Kelompok Data SIPD Kabupaten Bintan Tahun 2015 sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), di mana dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 ini bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bintan sangat terbantu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Sejatinya, ruh SIPD ini terdapat dalam amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 374 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Update data SIPD di lakukan setiap semester. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014, di mana evaluasi pengumpulan dilakukan Bulan Juni, sedangkan evaluasi terpadu dilakukan Bulan Desember. Sebagai Ketua Tim Pengelola SIPD Kabupaten, Bappeda mempunyai tugas mengevaluasi pengumpulan data meliputi aspek kelengkapan dan keterisian data SIPD, tumpang tindih dan duplikasi data SIPD. Setelah proses evaluasi dilaksanakan, Bappeda mempunyai kewajiban untuk upload dalam aplikasi SIPD online di alamat www.sipd.bangda.kemendagri.go.id. Web tersebut dibawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan laporan tingkat keterisian data yang kami ambil dari Web SIPD Kementerian Dalam Negeri, tingkat keterisian data SIPD Kabupaten Bintan Tahun 2015 mencapai **47,38%**. Keadaan tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yang baru mencapai **45,43%**. Kami berharap, data yang kami terima merupakan data yang benar, dan kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Bintan, Desember 2016

KEPALA BAPPEDA
Drs. MOHD. SETIOSO, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DARI KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BINTAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
SK PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016	
SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016	
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	5
C. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT SIPD	6
1. Tujuan Penyusunan SIPD.....	6
2. Sasaran	6
3. Manfaat SIPD	7
D. RUANG LINGKUP	9
1. Data Umum	9
2. Sosial Budaya	10
3. Sumber Daya Alam	11
4. Infrastruktur	11
5. Industri dan Perdagangan	11
6. Ekonomi dan Keuangan	12
7. Politik, Hukum dan Keamanan	12
8. Data Insidentil	12
BAB II SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)	13
A. PERKEMBANGAN SIPD	13
B. INTEGRASI SIPD DAN SDDKN	14
LAMPIRAN	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan website SIPD (revisi Tahun 2016)	7
Gambar 2. Bagan Pelaksanaan SIPD.....	7
Gambar 3. SIPD dalam RPJMD	8
Gambar 4. Peran SIPD dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD	8
Gambar 5. Integrasi SIPD dalam Penyusunan RPJMD	9
Gambar 6. Website SDDKN	15
Gambar 7. Integrasi SDDKN dan SIPD	17
Gambar 8. Nota Kesepakatan Integrasi SDDKN dan SIPD	17



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : / I / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya penerapan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), maka perlu dilakukan Koordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bintan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah yang tertuang didalam kelompok data dan jenis

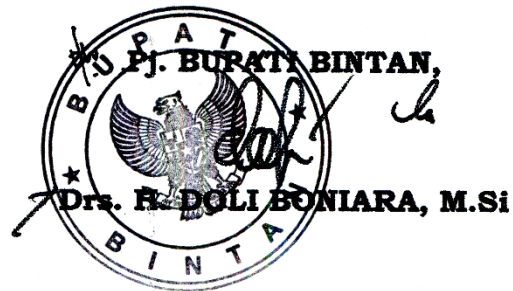
data SIPD berdasarkan instansinya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.
- c. Melakukan integrasi dan validasi data pembangunan secara berkala yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan SIPD Kabupaten Bintan.
- d. Mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD Kabupaten Bintan.
- e. Melakukan evaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten Bintan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui kegiatan Integrasi Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan Kode Rekening Nomor : 1.06.1.06.01.15.13

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : Januari 2016



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
- 5. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan
Nomor : / I / 2016
Tanggal : Januari 2016

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016**

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bintan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan	Pembina/ Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan	Ketua
4.	Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bintan	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi Bappeda Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan	Anggota
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan	Anggota
19.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Anggota


BUPATI BINTAN,
Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JALAN JEND. A. YANI KM. 5 TELEPON 29646, 29647 FAX (0771) 29646
TANJUNG PINANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 12 /SK/BPPD/2016
T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya penerapan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), maka diperlukan pengelolaan data yang akurat dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Kegiatan sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bintan Tahun 2016 melalui Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bintan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evsluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Infomrasi Pembangunan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten bintan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kegiatan sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bintan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kegiatan Sistem Informasi Pembanguna Daerah (SIPD) yang dibentuk sebagai berikut:
- a. Ketua Tim memiliki tugas dan fungsi melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas verifikator, help desk dan sistem administrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Tim Pengelola sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara berkala;
 - b. Sistem Administrasi memiliki Tugas dan Fungsi memberikan informasi dan masukan terkait laporan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara berkala;

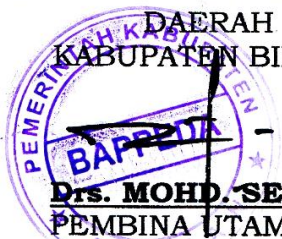
- c. Verifikator Data memiliki tugas dan fungsi melakukan verifikasi memeriksa data yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menyampaikan permasalahan yang ada;
- d. Help Desk memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan konsultasi mengenai pengisian data-data Pembangunan Daerah;
- e. Entry Data memiliki tugas dan fungsi membantu proses pengisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD dengan Kode Rekening Nomor : 1.06.1.06.0115.13

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Januari 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN BINTAN



Drs. MOHD. SETIOSO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730617 199311 1 001

Salinan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
5. Kepala DPPKD Kabupaten bintan di Kijang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
7. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. :

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda
Kabupaten Bintan
Nomor : 12 / SK/BPPD/2016
Tanggal : 4 JANUARI 2016

**KELOMPOK KERJA KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016**

Ketua Tim : Kepala Bappeda Kabupaten Bintan
Sistem : Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Bappeda
Administrasi : Kabupaten Bintan
Help Desk : Kasubbid Data dan Informasi Bappeda Kabupaten Bintan
Verifikasi Data : 1. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda
Kabupaten Bintan
2. Imansyah, A.Md
Entry Data : 1. Asrul, S.Sos
2. Eka Maria Susanti, ST
3. Bondan Kurniawan, A.Md
4. Meka Suevya Nata, A.Md
5. Sy. Nina Gustika
6. Ali Ridha Akab
7. Ria Elfanny

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN BINTAN


Drs. MOHD. SETIOSO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730617 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan program Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang difokuskan pada pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja pembangunan daerah. Sistem ini dirancang melalui aplikasi online berbasis web, dengan maksud mengumpulkan data dan informasi antar daerah kabupaten/kota dengan provinsi dan antar daerah provinsi dengan pusat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bagi aparat perencana merupakan salah satu regulasi yang memberikan penandasan kepada pemerintah untuk mensinergikan perencanaan pembangunan berbasis data. SIPD yang dulu Dengan kepanjangan Sistem Informasi Profil Daerah, isi dan materi datanya disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan. Pembangunan dalam segala bidang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam usaha mensejahterakan rakyatnya. Usaha itu harus direncanakan dan dievaluasi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat diperlukan sebelum melaksanakan kegiatan yang ingin dicapai.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa, Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (pasal 31) dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Data dan informasi yang digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup berbagai hal.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 berisi data seperti: Penyelenggaraan pemerintah daerah; Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; Kepala Daerah, DPRD, Perangkat daerah dan Pegawai negeri sipil daerah; Keuangan daerah; Potensi sumberdaya daerah; Kependudukan; Produk hukum daerah; Informasi dasar kewilayahan dan Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 274 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 yang lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 “Menteri Dalam Negeri secara periodik melakukan penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyempurnaan data dan informasi perencanaan pembangunan, sangat diperlukan karena data dan informasi akan berubah seiring dengan perubahan zaman.

Output kegiatan SIPD ini berupa data dan informasi yang berasal dari seluruh SKPD dan instansi vertikal di Kabupaten Bintan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan, pengendalian dan sekaligus evaluasi kinerja pembangunan Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 31);

C. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT SIPD

1. Tujuan Penyusunan SIPD

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan amanat pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Informasi yang dikelola didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam pengelolaan pembangunan daerah, baik dari segi manajemen beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya, pembangunan ekonomi wilayah, teknologi pembangunan, pengelolaan pembangunan wilayah, serta stabilitas daerah.

Adapun secara khusus tujuan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah:

1. Menyediakan data bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis data.

2. Sasaran

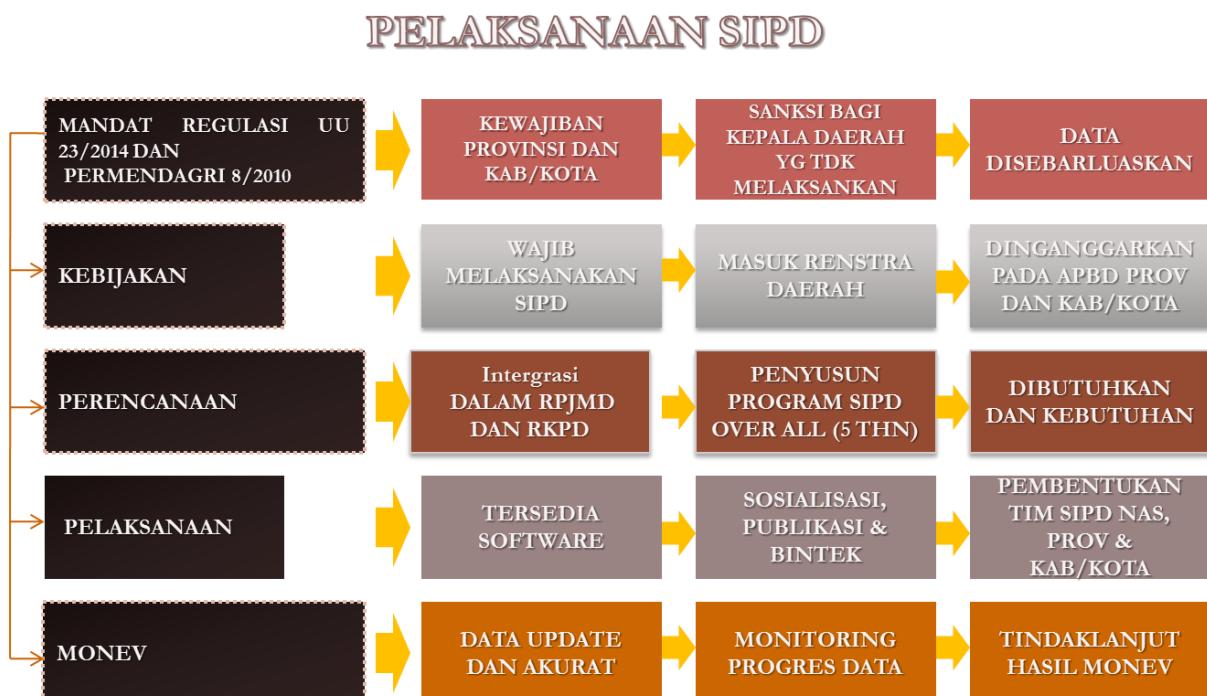
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 maka sasaran kegiatan penyusunan SIPD adalah :

- 1) Pembentukan Tim Koordinasi (Pokja SIPD Kabupaten Bintan)
- 2) Rapat koordinasi kelompok kerja pengumpulan data
- 3) Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data

- 4) Entry / updating 8 (delapan) kelompok data tahun 2015 secara online melalui jaringan sipd.bangda.depdagri.go.id



Gambar. 1 Tampilan web site SIPD (revisi)



Gambar. 2 Bagan Pelaksanaan SIPD

3. Manfaat SIPD

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan penyusunan SIPD antara lain :

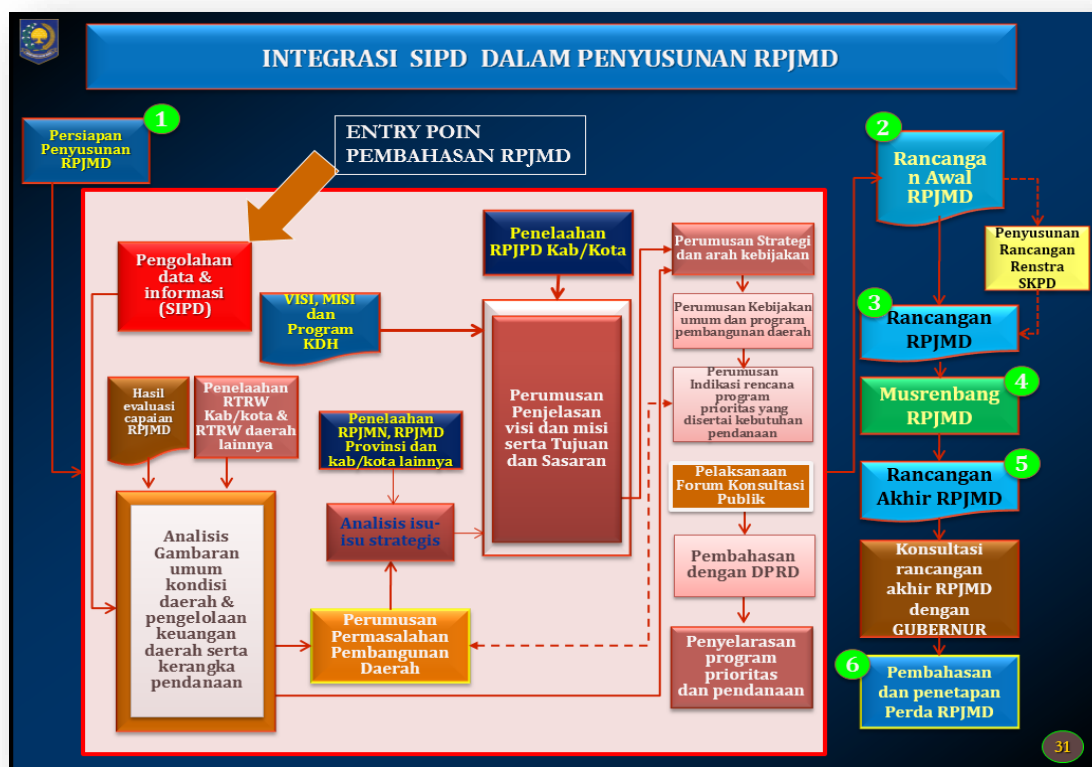
- 1) Tersedianya data dasar perencanaan pembangunan
- 2) Memetakan potensi yang dimiliki dan memetakan permasalahan yang dihadapi.
- 3) Sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 4) Mendukung pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah.
- 5) Mendukung promosi potensi daerah.



Gambar 3. SIPD dalam RPJMD



Gambar 4. Peran SIPD dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD



Gambar 5. Integrasi SIPD dalam Penyusunan RPJMD

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Materi Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini adalah 8 (delapan) kelompok data meliputi :

1. Data umum

Data umum mengulas data tentang :

- 1) Geografi Kabupaten Bintan yang meliputi letak wilayah, luas wilayah, Topografi, luas lahan, perubahan luas penggunaan lahan, dan keadaan iklim rata-rata di Kabupaten Bintan.
- 2) Pemerintahan Kabupaten Bintan seperti Administrasi pemerintah, Aparatur negara, perda dan perijinan, pelanggaran perda, PNS, TNI, POLRI, perangkat kelurahan, perangkat desa, Kondisi Sarana Prasarana dinas daerah dan lembaga

teknis, kondisi sarana prasarana pemerintahan desa, SKPD yang menerapkan kearsipan dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sosial Budaya

Data Sosial Budaya mengulas data tentang :

- 1) Agama, meliputi data jumlah pemeluk agama, sarana ibadah, jumlah jamaah haji, KUA, penyuluh agama, dan lembaga pendidikan agama.
- 2) Demografi, mengulas data tentang :
 - a) Kependudukan dan catatan sipil, migrasi penduduk, keluarga;
 - b) Ketenagakerjaan dan transmigran;
- 3) Kesehatan, mengulas data tentang :
 - a) Sarana kesehatan;
 - b) Layanan air bersih;
 - c) Industri Farmasi, dan Pedagang Kesehatan;
 - d) Kesehatan masyarakat;
 - e) Tenaga kesehatan;
 - f) Kebidanan;
 - g) Penanganan penderita penyakit;
- 4) Data pendidikan, meliputi data tentang :
 - a) Sekolah, siswa dan guru;
 - b) Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka
 - c) Partisipasi Murni
 - d) Angka melanjutkan sekolah, kelulusan dan siswa miskin;
 - e) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang bersekolah;
 - f) Pemuda dan olah raga;
 - g) Perpustakaan;
- 5) Kesejahteraan sosial, meliputi data tentang :
 - a) Indeks Pembangunan Manusia;

- b) Kemiskinan;
- c) Potensi dan sumber kesejahteraan masyarakat;
- d) Penyandang masalah kesejahteraan masyarakat;
- e) Agama;

3. Sumber Daya Alam

Data SDA mengulas data tentang :

- 1) Pertanian, kehutanan, peternakan dan perkebunan, meliputi data tentang :
 - a) Pertanian;
 - b) Hortikultura;
 - c) Perkebunan;
 - d) Peternakan;
 - e) Perikanan;
 - f) Kehutanan;
- 2) Pertambangan dan energi, meliputi data tentang : Pelayanan energi listrik dan bahan bakar;
- 3) Lingkungan hidup dan tata ruang;
- 4) Sampah dan air limbah;

4. Infrastruktur

Data infrastruktur terdiri dari data tentang :

- 1) Perumahan dan pemukiman;
- 2) Pekerjaan umum, meliputi data tentang panjang dan kondisi jalan baik, kondisi jalan dan jembatan, tempat pemakaman, prasarana irigasi, dan sumber air minum;
- 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan informatika;
- 4) Perhubungan dan transportasi.

5. Industri dan Perdagangan

Data industri dan perdagangan terdiri data tentang :

- 1) Industri kecil, industri besar, perdagangan; koperasi, pengusaha, perijinan;

- 2) Realisasi investasi PMDN Per Sektor, lembaga keuangan,
- 3) Pengelolaan aset atau barang daerah;

6. Ekonomi dan Keuangan

Data ekonomi dan keuangan terdiri dari data tentang PDRB, APBD, BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.

7. Politik, Hukum dan Keamanan

Data politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, kasus pelanggaran hukum, tindak kriminal, keamanan dan ketertiban masyarakat.

8. Data Insidentil

Data insidentil terdiri dari data tentang Bencana alam, penyakit menular, kebakaran hutan, pencurian dan penyelundupan kayu.

BAB II

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

A. PERKEMBANGAN SIPD

Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan menuju kesempurnaan. Tahun 1990, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri telah merintis dalam pengumpulan data yang terstruktur secara nasional dan dibuat secara otomatis. Setelah berjalan beberapa saat dan dievaluasi kegiatan itu disempurnakan menjadi **Pusat Data untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D)**. Kegiatan penyempurnaan data ini didukung dengan regulasi berupa Inmendagri Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data Pokok Pembangunan untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan di Daerah.

Untuk mempermudah dalam pemanfaatan data dan informasi, Menteri dalam Negeri menerbitkan Inmendagri Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D). Instruksi tersebut menekankan kepada pemerintah daerah agar memanfaatkan data dan informasi yang ada pada seluruh dinas/instansi maupun Lembaga Non Pemerintah, karena dalam program PDP3D tidak hanya mengembangkan infrastruktur dan membangun basis data saja akan tetapi juga bagaimana mereformasi atau mengubah pola pikir semua pihak untuk menempatkan posisi data sebagai hal yang sangat strategis, penting dan mempunyai komitmen yang tinggi bagi penguatan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional dalam menyediakan data yang informatif.

Tahun 2013 Kabupaten Bintan mulai melaksanakan entry data SIPD melalui Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pada tahun 2013 pengisian data masih bersifat himbauan oleh Ditjen Bangda Kemendagri. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan amanat dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah

didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, maka pelaksanaan kegiatan pengisian data pada aplikasi SIPD menjadi wajib dilaksanakan. Untuk itu pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan koordinator Bappeda Kabupaten Bintan.

Mulai tahun 2014, istilah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), oleh Kementerian Dalam Negeri disempurnakan menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Program tersebut masuk pada anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam APBD Kabupaten Bintan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merangkum data pembangunan masing-masing daerah dan berbasis visual. Perkembangan system ini memiliki output yang dapat menampilkan analisa dan data tabular. Perubahan elemen data terjadi pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan Tahun 2014, dari 8 Kelompok Data terdiri dari 31 Jenis Data (Elemen Data Kabupaten/Kota) dengan 3.034 elemen data (Kabupaten/Kota sebanyak 2482 dan Provinsi 552). Berubah menjadi 2.691 elemen data. Sedangkan Jenis Data tetap 31 jenis dan 8 kelompok data.

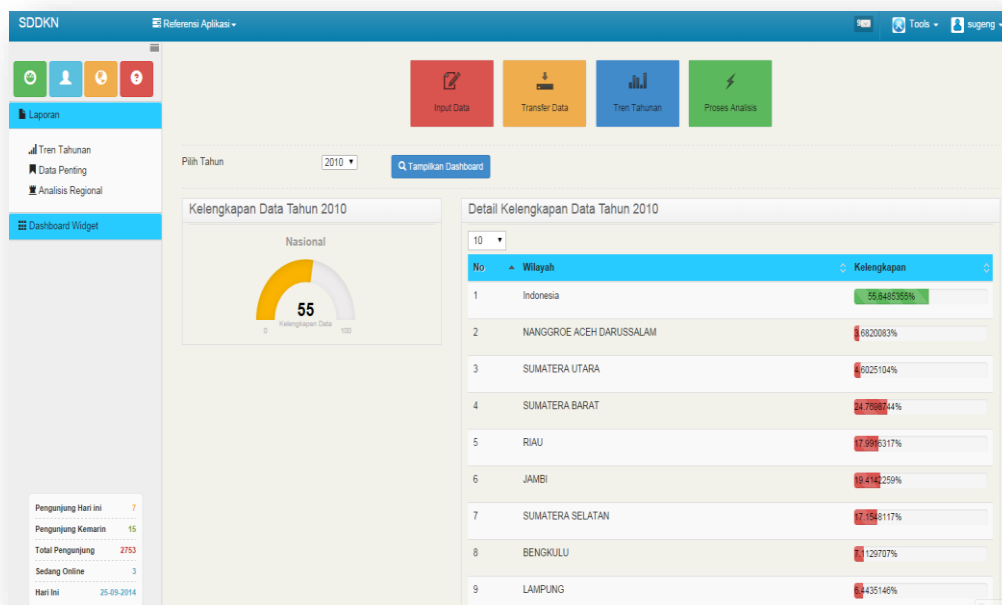
Pada tahun 2016 ini Dirjen Bangda Kemendagri juga telah melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi SIPD. Penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap elemen data.

B. INTEGRASI SIPD DAN SDDKN

Pada tanggal 06-08 Oktober 2015 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komputer Aplikasi Sistem DataBase Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta. SDDKN dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan instrument penting dalam memberikan masukan dalam menentukan kebijakan

pembangunan, yang bisa dijadikan sebagai salah satu acuan analisa dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di daerah bahkan nasional. Keberadaan sistem ini perlu dukungan/sharing pasokan data yang berkesinambungan dari daerah serta pihak lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang bersesuaian dengan data yang dibutuhkan oleh SDDKN. Maksud dan tujuan diadakannya Bimtek TIK Aplikasi Sistem BataBase Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) adalah agar aparaturnya di daerah yang bertindak selaku pengelola SIPD maupun SDDKN memahami serta dapat melakukan entry data secara benar sesuai prosedur serta memahami proses integrasi data SIPD dan SDDKN.

Tujuan dari pengembangan Sistem DataBase Dukungan Kebijakan Nasional SDDKN adalah menyediakan data dan informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh para pimpinan nasional dan daerah, Mengkomunikasikan data dan informasi dari daerah ke pusat dan sebaliknya melalui jaringan komunikasi data dan Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan dan mendapatkan gambaran yang terkini dari pelaksanaan program-program pembangunan di seluruh Indonesia. Aplikasi SDDKN dapat diakses melalui mesin pencari di internet dengan alamat <http://sddkn.setneg.go.id>. Apabila kita berhasil mengakses aplikasi SDDKN maka akan tampil Dashboard SDDKN sebagaimana dapat dilihat seperti dibawah ini :

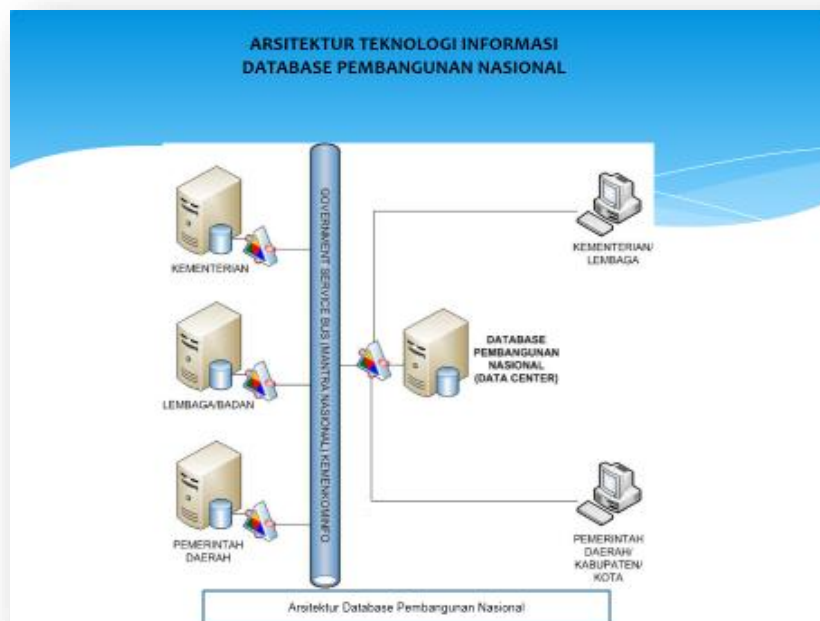


Gambar 6. Website SDDKN

Sejarah pengembangan SDDKN yaitu sejak dibangunnya Sistem DataBase Dukungan Kebijakan Nasional tahun 2002 yaitu Kerjasama Sekretariat Negara dengan PT. Bank Mandiri melalui kerjasama No.Perj.118/Sesneg/12/2002 dan Nomor DIR.PKS/02/2002 dalam rangka Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Pembangunan Nasional (SIPNAS), tahun 2003 MOU antara Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat Negara No: 96 Tahun 2003 dan Nomor : Perj.106/Sesneg/10/2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengoperasian Sistem Informasi Pembangunan Nasional (SIPNAS), selanjutnya tahun 2004 dikembangkan melalui APBN dengan prioritas data nasional. Dalam Tahun Anggaran itu juga dipilih satu Propinsi dijadikan pilot proyek yaitu Propinsi Banten melalui fasilitas komunikasi data PT.Telkom, tahun 2006 SIPNAS dikembangkan ke seluruh propinsi. Pemasangan workstation di 33 propinsi dengan VPN-Dial-Up, dan workshop di 17 propinsi. Sementara itu kegiatan pengumpulan data juga telah dilakukan bersama DEPDAGRI melalui program SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah), tahun 2007 dimulai pengembangan aplikasi berbasis web. Modul pengelolaan laporan data masih dalam bentuk teks. Server dan 33 workstation di 33 Propinsi telah berfungsi untuk komunikasi dengan menggunakan VPN-Dial Up, tahun 2008 Pengumpulan data dapat dilakukan secara on-line berbasis web, variabel data dikurangi menjadi 1207. Selanjutnya SIPNAS berganti nama menjadi SDDKN, tahun 2014 Pengembangan SDDKN versi 2, dan selanjutnya tahun 2015 dilakukan **integrasi SDDKN-SIPD**. Sedangkan maksud dari integrasi data SIPD dan SDDKN sendiri adalah agar tersedia dan terintegrasikannya sebuah data dalam suatu wadah yang mampu diakses secara cepat, dan tepat. Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), merupakan dua dari beberapa sistem database yang dibuat dengan tujuan untuk mengintegrasikan data-data yang bisa digunakan sebagai database Pembangunan Nasional.

Elemen data didalam Database SDDKN terdiri dari 8 kelompok, 1207 elemen terdiri dari Data Umum, Ekonomi dan Keuangan, Infrastruktur, Politik, Hukum dan Keamanan, Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha dan Investasi, Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Insidensial.

Untuk fitur-fitur yang dimiliki dalam SDDKN adalah Penambahan Modul SDDKN, Adanya modul **Role Mapping** untuk mengatur hubungan antar wilayah dengan kelompok data yang harus diisi, modul *Copy Data*, modul *Forum*, modul Pesan yang berfungsi untuk pengiriman pesan. Pesan bisa dikirim dengan tipe *Private* yaitu *chatting* antar user terkait SDDKN, **Broadcast** atau pengiriman pesan kepada beberapa user aktif serta **Pengaduan Data** yang berfungsi untuk komunikasi dengan Tim Pengelola SDDKN Setneg. Adanya fitur Tracking untuk melakukan pengecekan tracking data (berdasar kategori atau daerah)



Gambar 7. Integrasi SDDKN dan SIPD



Gambar 8. Nota Kesepakatan antar Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Dalam Negeri

Usaha yang telah dilakukan saat ini dengan LEMHANAS antara lain

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam usaha percepatan lahirnya Peraturan Presiden tentang e-Government.
2. Identifikasi data SDDKN dengan data SIPD meliputi nama elemen data, definisi operasional, serta satuan elemen data. SDDKN memiliki 1.207 elemen data sedangkan SIPD memiliki 2.674 elemen data. Hasil pembahasan identifikasi elemen data dengan Kemsetneg, Kemendagri dan BPS didapat keseragaman elemen data pada SDDKN menjadi sebanyak 1.022 elemen data.
3. Hasil identifikasi akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keseragaman data yang dapat di integrasikan antara SDDKN-SIPD dengan menggunakan fasilitas web service melalui jalur MANTRA Kemenkominfo.

Hal-hal yang ditekankan dalam Bimbingan Teknis TIK Aplikasi Sistem BataBase Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) di Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah :

1. Pentingnya pengumpulan dan ketersediaan data pembangunan daerah/nasional dalam perumusan dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan;
2. Menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini dalam menggambarkan keadaan pembangunan yang sesungguhnya;
3. Memudahkan dan mempercepat dalam proses analisa dan pelaporan, serta rekomendasi kepada pimpinan guna pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, Keterbukaan informasi dalam bentuk sharing data sehingga dapat dimanfaatkan bersama antara K/L Pusat dan Pemda, Data yang selalu dapat terupdate;
4. tersimpan dan termonitor dengan aman dan baik dan Akses data dimana saja dan kapan saja dengan media elektronik/ internet.

LAMPIRAN

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Geografi

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Luas Wilayah **	88.038,54	Km2
1. Daratan	1.946,13	Km2
2. Laut 12 Mil dari Darat	86.092,41	Km2
3. Zona Laut **		Km2
1). Laut Teritorial		Km2
2). Zona Ekonomi Eksklusif		Km2
3). Laut Landasan Kontinen		Km2
4. Panjang Garis Pantai	966,54	Km
II. Topografi *		
1. Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng *		
1). Datar (0-2 Derajat)	767,75	Ha
2). Bergelombang (2-15 Derajat)	368,45	Ha
3). Curam (15-40 Derajat)	732,65	Ha
4). Sangat curam (>40 Derajat)	77,28	Ha
2. Ketinggian di atas Permukaan Laut	1.946,13	m
III. Luas Lahan *		
1. Luas Lahan Hutan **	7.679	Ha
1). Hutan Produksi Tetap		Ha
2). Hutan Produksi Terbatas		Ha
3). Hutan yang Dapat Dikonversi		Ha
4). Hutan Bakau	7.679	Ha
2. Jumlah Lahan Persawahan **	40	Ha
1). Sawah Irigasi		Ha
2). Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	40	Ha
3). Sawah Pasang Surut		Ha
4). Sawah Lainnya		Ha
3. Jumlah Lahan Kering **		Ha
1). Rawa-Rawa		Ha
2). Ladang (Tegalan)		Ha
3). Perkebunan		Ha
4). Usaha Lain		Ha
5). Belum / Tidak Diusahakan		Ha
4. Lahan Pertambangan		Ha
5. Danau/Telaga Alam		Ha
6. Waduk (Buatan)	1.304,38	Ha
7. Kolam Air Tawar	377,33	Ha
8. Tambak Ikan	151,3	Ha
9. Padang Rumput Alam		Ha
10. Tanah Tandus/Tanah Rusak (Tdk Diusahakan)		Ha
11. Tanah Terlantar		Ha
12. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah **	109.215,81	Ha
1). Kolam/Empang/Tambak	301	Ha
2). Danau/Telaga Alam		Ha

Nama	Nilai	Satuan
3). Ladang/Tegalan/Kebun/Padang Rumput		Ha
4). Kebun Campuran	0	Ha
5). Perkebunan	6.797	Ha
6). Hutan	38.796,23	Ha
7). Perumahan dan Permukiman		Ha
8). Industri	62.017,2	Ha
9). Bangunan Lainnya/Perkantoran		Ha
10). Non Sawah Sementara yang Tidak Diusahakan		Ha
11). Waduk (Buatan)	1.304,38	Ha
12). Lainnya		Ha
13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan *		
1). Perubahan Penggunaan Sawah **		Ha
1. Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah		Ha
2. Menjadi Perumahan		Ha
3. Menjadi Industri		Ha
4. Menjadi Perusahaan/Perkantoran		Ha
5. Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah		Ha
6. Menjadi Lahan Lainnya		Ha
2). Luas Alih Fungsi Hutan **		Ha
1. Hutan Menjadi Lahan Sawah		Ha
2. Hutan Menjadi Perumahan		Ha
3. Hutan Menjadi Lahan Industri		Ha
4. Hutan Menjadi Perusahaan/Perkantoran		Ha
5. Hutan Menjadi Lahan Bukan Sawah		Ha
6. Hutan Menjadi Lahan Lainnya		Ha
14. Penggunaan Lahan (Land Use) per Sektor **	5.044	Ha
1). Pertanian	5.044	Ha
2). Pertambangan dan Penggalian		Ha
3). Industri Pengolahan		Ha
4). Listrik, Air dan Air Bersih		Ha
5). Bangunan		Ha
6). Perdagangan		Ha
7). Pengangkutan dan Komunikasi		Ha
8). Keuangan		Ha
9). Jasa-Jasa		Ha
IV. Keadaan Iklim Rata-Rata *		
1. Suhu *		
1). Suhu Terendah	22,2	°C
2). Suhu Tertinggi	33,2	°C
2. Kelembaban Udara *		
1). Kelembaban Udara Terendah	85	%
2). Kelembaban Udara Tertinggi	87	%
3. Curah Hujan *		
1). Curah Hujan Terendah		mm/th
2). Curah Hujan Tertinggi		mm/th
4. Kecepatan Angin *		
1). Kecepatan Angin Terendah		Knot
2). Kecepatan Angin Tertinggi		Knot

Nama	Nilai	Satuan
V. Jumlah Pulau *		
1. Pulau Berpenghuni	39	Buah
1). Jumlah Penduduk		Jiwa
2). Jumlah KK		KK
3). Luas Daratan Pulau Berpenghuni		Ha
4). Luas Lahan Produktif Pulau Berpenghuni		Ha
5). Luas Lahan Budidaya Pulau Berpenghuni		M2
6). Jumlah Mercusuar		Buah
2. Pulau Berpenghuni Tidak Tetap	0	Buah
1). Jumlah Penduduk Singgah		Jiwa
2). Luas Daratan Pulau Berpenghuni Tidak Tetap		Ha
3). Luas Lahan Produktif Pulau Berpenghuni Tidak Tetap		Ha
4). Luas Lahan Budidaya Pulau Berpenghuni Tidak Tetap		M2
5). Jumlah Mercusuar		Buah
3. Pulau Tidak Berpenghuni	191	Buah
4. Pulau Bernama	240	Buah
1). Jumlah Penduduk		Jiwa
2). Jumlah KK		KK
3). Luas Daratan Pulau Bernama		Ha
4). Luas Lahan Produktif Pulau Bernama		Ha
5). Luas Lahan Budidaya Pulau Bernama		M2
6). Jumlah Mercusuar		Buah
5. Pulau Tidak Bernama		Buah
1). Jumlah Penduduk		Jiwa
2). Jumlah KK		KK
3). Luas Daratan Pulau Tidak Bernama		Ha
4). Luas Lahan Produktif Pulau Tidak Bernama		Ha
5). Luas Lahan Budidaya Pulau Tidak Bernama		M2
6). Jumlah Mercusuar		Buah
6. Pulau-Pulau Kecil (Luas di bawah 100 km ²)		Buah
1). Jumlah Penduduk		Jiwa
2). Jumlah KK		KK
3). Luas Daratan Pulau - Pulau Kecil		Ha
4). Luas Lahan Produktif Pulau - Pulau Kecil		Ha
5). Luas Lahan Budidaya Pulau - Pulau Kecil		M2
6). Jumlah Mercusuar		Buah
7. Pulau terluar/perbatasan dengan negara lain	1	Buah
1). Jumlah Penduduk	0	Jiwa
2). Jumlah KK	0	KK
3). Luas Daratan Pulau Berpenghuni	0	Ha
4). Luas Lahan Produktif Pulau terluar	0	Ha
5). Luas Lahan Budidaya Pulau terluar	0	M2
6). Jumlah Mercusuar	0	Buah
VI. Jumlah Gunung **	1	Buah
1. Aktif		Buah
2. Non - Aktif	1	Buah
3. Vulkanik		Buah
VII. Panjang Perbatasan Darat dengan Negara Lain **		Km

Nama	Nilai	Satuan
1. Papua - Papua Nugini		Km
2. Kalimantan-Malaysia		Km
3. NTT-Timor Leste		Km
VIII. Fisiografi Lahan *		
1. Luas Area Pegunungan		Km
2. Luas Area Berbukit-Bukit		Km
3. Luas Area Dataran		Km
4. Luas Area Pesisir		Km

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintang
Pemerintahan (Administrasi
Pemerintahan, Aparatur
Negara, Administrasi
Kepegawaian)
2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Administrasi Pemerintahan *		
1. Jumlah Kecamatan	10	Kec.
2. Jumlah Kelurahan	15	Kel.
3. Jumlah Desa	36	Desa
4. Klasifikasi Desa **		Desa
1). Desa Swadaya		Desa
2). Desa Swakarya		Desa
3). Desa Swasembada		Desa
4). Desa Pesisir		Desa
5). Desa Perhutanan		Desa
6). Perindustrian/Jasa		Desa
7). Desa Perkebunan		Desa
8). Desa Perladangan		Desa
9). Desa Persawahan		Desa
10). Desa Pertambangan		Desa
11). Desa Peternakan		Desa
12). Desa Wisata		Desa
5. Jumlah RW	198	RW
6. Jumlah RT	606	RT
7. Jumlah Dusun	74	Dusun
II. Status Otonomi Kabupaten / Kota *		
1. Daerah Otonomi Baru		Wilayah
2. Daerah Induk		Wilayah
3. Daerah Dampak Pemekaran		Wilayah
4. Daerah Non Pemekaran		Wilayah
III. Perda dan Perijinan *		
1. Jumlah Perda Yang Diterbitkan	13	Unit
2. Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW		Unit
3. Perda Yang Dikeluarkan		Unit
1). Jumlah Peraturan Daerah Untuk RTRW	1	Unit
2). Jumlah IMB Yang Dikeluarkan		Unit
3). Jumlah Ijin Prinsip Yang Dikeluarkan		Unit
4). Jumlah Ijin Usaha Yang Di Keluarkan		Unit
5). Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan		Unit
6). Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan		Unit
7). Jumlah ijin Untuk Hak Pengusahaan Pertambangan		Unit
8). Jumlah Perijinan Investasi PMA Yang Dikeluarkan/Setujui		Unit
9). Jumlah Perijinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui		Unit
10). Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		Unit

Nama	Nilai	Satuan
11). Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA		Unit
12). Jumlah dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		Unit
13). Jumlah program RKPD tahun berkenaan		Unit
14). Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan		Unit
15). Jumlah izin lokasi		Unit
16). Jumlah pemohon izin lokasi		Orang
17). Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha		Unit
18). Jumlah Pelanggaran Perda		Unit
19). Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda		Unit
4. Jumlah Perda terkait perijinan		Unit
5. Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa		Unit
6. Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan		Unit
IV. Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan *		
1. Kantor Bupati/Walikota		Unit
2. Kantor Setda		Unit
1). Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	124	Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	5	Orang
3. SMP dan Sederajat	9	Orang
4. SMA dan Sederajat	49	Orang
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	9	Orang
6. Sarjana (S1)	52	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan **	133	Orang
1. Golongan I	6	Orang
2. Golongan II	63	Orang
3. Golongan III	42	Orang
4. Golongan IV	22	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural **	47	Orang
1. Eselon I	0	Orang
2. Eselon II	9	Orang
3. Eselon III	10	Orang
4. Eselon IV	28	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	86	Orang
5). Jumlah Pensiunan PNS **		Orang
1. Eselon I		Orang
2. Eselon II		Orang
3. Eselon III		Orang
4. Eselon IV		Orang
3. Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	1	Unit
4. Kantor Inspektorat		Unit
1). Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	0	Orang
3. SMP dan Sederajat	2	Orang
4. SMA dan Sederajat	8	Orang

Nama	Nilai	Satuan
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	4	Orang
6. Sarjana (S1)	15	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan **	31	Orang
1. Golongan I	0	Orang
2. Golongan II	6	Orang
3. Golongan III	19	Orang
4. Golongan IV	6	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural **	9	Orang
1. Eselon I	0	Orang
2. Eselon II	1	Orang
3. Eselon III	5	Orang
4. Eselon IV	3	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	22	Orang
5). Jumlah Pensiunan PNS **	0	Orang
1. Eselon I	0	Orang
2. Eselon II	0	Orang
3. Eselon III	0	Orang
4. Eselon IV	0	Orang
5. Kantor Bappeda		Unit
1). Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	40	Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	0	Orang
3. SMP dan Sederajat	1	Orang
4. SMA dan Sederajat	10	Orang
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	5	Orang
6. Sarjana (S1)	24	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan **	40	Orang
1. Golongan I	1	Orang
2. Golongan II	9	Orang
3. Golongan III	27	Orang
4. Golongan IV	3	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural **	17	Orang
1. Eselon I	0	Orang
2. Eselon II	1	Orang
3. Eselon III	5	Orang
4. Eselon IV	11	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	24	Orang
5). Jumlah Pensiunan PNS **		Orang
1. Eselon I		Orang
2. Eselon II		Orang
3. Eselon III		Orang
4. Eselon IV		Orang
6. Kantor Dinas Daerah		Unit
1). Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	2.632	Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	22	Orang
3. SMP dan Sederajat	39	Orang
4. SMA dan Sederajat	589	Orang

Nama	Nilai	Satuan
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	785	Orang
6. Sarjana (S1)	1.197	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan **	2.691	Orang
1. Golongan I	18	Orang
2. Golongan II	693	Orang
3. Golongan III	1.498	Orang
4. Golongan IV	482	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural **	321	Orang
1. Eselon I	0	Orang
2. Eselon II	14	Orang
3. Eselon III	57	Orang
4. Eselon IV	250	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	2.350	Orang
5). Jumlah Pensiunan PNS **		Orang
1. Eselon I		Orang
2. Eselon II		Orang
3. Eselon III		Orang
4. Eselon IV		Orang
7. Kantor Lembaga Teknis Daerah		Unit
1). Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	495	Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	15	Orang
3. SMP dan Sederajat	27	Orang
4. SMA dan Sederajat	226	Orang
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	50	Orang
6. Sarjana (S1)	177	Orang
2). Jumlah PNS Berdasarkan Golongan **	511	Orang
1. Golongan I	25	Orang
2. Golongan II	222	Orang
3. Golongan III	225	Orang
4. Golongan IV	39	Orang
3). Jumlah Pejabat Struktural **	153	Orang
1. Eselon I	0	Orang
2. Eselon II	9	Orang
3. Eselon III	42	Orang
4. Eselon IV	102	Orang
4). Jumlah Pejabat Fungsional	361	Orang
5). Jumlah Pensiunan PNS **		Orang
1. Eselon I		Orang
2. Eselon II		Orang
3. Eselon III		Orang
4. Eselon IV		Orang
8. Kantor Pemerintah Desa		Unit
1). Jumlah Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan **		Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD		Orang
2. Tamat SD atau Sederajat		Orang
3. SMP dan Sederajat		Orang

Nama	Nilai	Satuan
4. SMA dan Sederajat		Orang
5. Akademi (DI, DII dan DIII)		Orang
6. Sarjana (S1)		Orang
9. Kantor Camat		Unit
1). Jumlah Aparat Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	161	Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	5	Orang
3. SMP dan Sederajat	5	Orang
4. SMA dan Sederajat	83	Orang
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	14	Orang
6. Sarjana (S1)	54	Orang
10. Kantor Lurah *		
1). Jumlah Aparat Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	94	Orang
1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	0	Orang
2. Tamat SD atau Sederajat	1	Orang
3. SMP dan Sederajat	2	Orang
4. SMA dan Sederajat	35	Orang
5. Akademi (DI, DII dan DIII)	12	Orang
6. Sarjana (S1)	44	Orang
V. Kondisi sarana Prasarana Pemerintahan *		
1. Kantor Dinas Daerah *		
1). Rusak Ringan (Kerusakan < 30%)		Unit
2). Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%)		Unit
3). Rusak Berat (Kerusakan >50%)		Unit
2. Kantor Lembaga Teknis Daerah *		
1). Rusak Ringan (Kerusakan < 30%)		Unit
2). Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%)		Unit
3). Rusak Berat (Kerusakan >50%)		Unit
3. Kantor Pemerintah Desa *		
1). Rusak Ringan (Kerusakan < 30%)		Unit
2). Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%)		Unit
3). Rusak Berat (Kerusakan >50%)		Unit
6. Kantor Dinas		Unit
1). Milik Sendiri	10	Unit
2). Sewa	0	Unit
3). Pinjam	2	Unit
4). Gabung	2	Unit
7. Kantor Lembaga Teknis Daerah *		
1). Milik Sendiri	5	Unit
2). Sewa	0	Unit
3). Pinjam	1	Unit
4). Gabung	3	Unit
VI. Satuan Kerja Perangkat Daerah *		
1. Jumlah SKPD	38	SKPD
2. Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku		SKPD
3. Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		Kegiatan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Demografi

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Kependudukan dan Catatan Sipil *		
1. Jumlah penduduk wajib KTP	95.186	Orang
2. Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin **	65.014	Orang
1). Laki-Laki	33.978	Orang
2). Wanita	31.036	Orang
3. Jumlah Penduduk > 17 yang ber-KTP Berdasarkan Jenis Kelamin **	65.014	Orang
1). Laki-Laki	33.978	Orang
2). Wanita	31.036	Orang
4. Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah	64.569	Orang
5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin **	140.267	Orang
1). Laki-Laki	72.503	Orang
2). Perempuan	67.764	Orang
6. Jumlah pasangan nikah berakta nikah	25.692	Pasang
7. Jumlah keseluruhan pasangan nikah	32.196	Pasang
8. Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK	140.267	Orang
9. Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	77.993	Orang
II. Penduduk Memiliki Lahan **		Penduduk
1. Pertanian		Penduduk
2. Non Pertanian		Penduduk
III. Jumlah Keluarga Berdasarkan Mata Pencarian **		KK
1. Pertanian		KK
2. Non Pertanian		KK
IV. Jumlah Penduduk Menurut Usia **	5.751	Orang
1. 4 - 6 Tahun		Orang
2. 7 - 12 Tahun		Orang
3. 13 - 15 Tahun		Orang
4. 16 - 18 Tahun		Orang
5. 19 - 24 Tahun		Orang
6. 25 - 29 Tahun		Orang
7. 30 -34 Tahun		Orang
8. 35 - 39 Tahun		Orang
9. 40 - 44 Tahun		Orang
10. 45 - 49 Tahun		Orang
11. 50 - 54 Tahun		Orang
12. 55 - 59 Tahun		Orang
13. 60 - 64 Tahun		Orang
14. > 65 Tahun	5.751	Orang
V. Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)		%
VI. Kepadatan Penduduk *		
1. Kawasan Perkotaan		Org/km2
2. Kawasan Pedesaan		Org/km2

Nama	Nilai	Satuan
VII. Tingkat Pendapatan, Pengeluaran dan Tabungan *		
1. Pendapatan per Kapita		Rp
2. Indeks Harga Konsumen		Poin
3. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Indeks Daya Beli) *		
1). Tingkat Rataan Daya Beli (Rp Ribu/Kapita/Tahun)		Rp
4. Total Pengeluaran		Rp
5. Total Pengeluaran Rumah Tangga Non Pangan		Rp
VIII. Ketenagakerjaan *		
1. Penduduk 15 Tahun Ke atas **	190,101	Orang
1). Menurut Jenis Kegiatan	66,415	Orang
2). Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	61,843	Orang
3). Menurut Status Pekerjaan Utama	61,843	Orang
2. Angkatan Kerja **	68,063	Orang
1). Bekerja **	63,476	Orang
1. Perempuan Bekerja	23,299	Orang
2. Laki-laki Bekerja	40,177	Orang
2). Mencari Pekerjaan	4,587	Orang
1. Perempuan Bekerja	2,385	Orang
2. Laki-laki Bekerja	2,202	Orang
3. Kesempatan Kerja	9.326	%
4. Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftarkan	2,042	Orang
5. Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1,249	Orang
6. Jumlah Pengangguran : **	4,587	Orang
1). Pengangguran Terselubung		Orang
2). Setengah Menganggur		Orang
3). Pengangguran Terbuka	4,587	Orang
7. Tenaga Kerja Dalam Negeri **	778,966	Orang
1). Tenaga Kerja Wanita	4,568	Orang
2). Tenaga Kerja Pria	11,64	Orang
3). Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA	7,758	Orang
4). Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMDN	755	Orang
8. TKI Di Luar Negeri **		Orang
1). Tenaga Kerja Wanita		Orang
2). Tenaga Kerja Pria		Orang
9. PHK *		
1). Kasus PHK	22	Kasus
2). Orang Terkena PHK	112	Orang
10. Rata-Rata Upah Minimum Regional/Bulan	2,372	Rupiah
11. Pencari Kerja	2,042	Orang
12. Angka Pekerja dengan Upah Sesuai UMR	98	%
13. Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR		Rp.
14. Angka Rata-rata Jam Kerja	7	Jam
15. Angka partisipasi pekerja peserta ASTEK dan sejenisnya		%
16. Angka partisipasi perusahaan peserta ASTEK dan sejenisnya		%
17. Angka Partisipasi Jamsostek	9.840	%
18. Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Jamsostek	9.411	%
IX. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha **	750,473	Orang

Nama	Nilai	Satuan
1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	1,446	Orang
2. Pertambangan dan Penggalian	372	Orang
3. Industri Pengolahan	4,978	Orang
4. Listrik, Gas dan Air	33	Orang
5. Bangunan	2,501	Orang
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	5,023	Orang
7. Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	181	Orang
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	149	Orang
9. Jasa Kemasyarakatan	1,525	Orang
X. Pertumbuhan Penduduk *		
1. Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun)		%
2. Jumlah Kematian Bayi (Berumur Kurang 1 tahun)		Jiwa
3. Angka Kematian Bayi (IMR)		%
4. Angka Kematian Ibu (MMR)		Jiwa
5. Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) *		
1). Jumlah Migrasi Masuk		Jiwa
2). Jumlah Migrasi Keluar		Jiwa
6. Jumlah Kelahiran Hidup		Jiwa
7. Rata-rata Anak Yang Dilahirkan Hidup		Jiwa
8. Rata-rata Anak Yang Masih Hidup		Jiwa
XI. Rata-Rata Angka Harapan Hidup ***		Tahun
1. Laki - Laki		Tahun
2. Perempuan		Tahun
XII. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	99.230	Orang
1. Tidak Tamat SD	26.295	Orang
2. Tamat SD	23.233	Orang
3. Tamat SMP	16.177	Orang
4. Tamat SMA	28.483	Orang
5. Diploma	2.709	Orang
6. Sarjana S1	2.263	Orang
7. Sarjana S2	58	Orang
8. Sarjana S3	12	Orang
XIII. Keluarga *		
1. Jumlah Keluarga (KK)	39.097	KK
2. Jumlah Anak		Anak
XIV. Jumlah Rumah Tangga		RT
XV. Ukuran Rumah Tangga (Orang/RT)		Orang
XVI. Jumlah Rumah Tinggal		Unit
XVII. Petani dan Nelayan *		
1. Jumlah Rumah Tangga Petani **		RT
1). Petani		RT
2). Buruh Tani		RT
2. Jumlah Rumah Tangga Nelayan **		RT
1). Nelayan Penuh		RT
2). Nelayan Sambilan Utama		RT
3). Nelayan Sambilan Tambahan		RT
3. Jumlah Transmigrasi		KK

Nama		Nilai	Satuan
4. Transmigrasi Baru			KK
5. Jumlah Transmigrasi Swakarsa			KK
XVIII. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *			
1. Jumlah Pekerja Perempuan **			Orang
1). Lembaga Pemerintahan **		241	Orang
III	1. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon II	2	Orang
	2. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon	33	Orang
	3. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon	206	Orang
2). Lembaga Swasta			Orang
XIX. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur **			Orang
1. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur (5-14 tahun)			Orang
2. Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas			Orang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Kesehatan

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Sarana Kesehatan *		
1. Posyandu **	324	Unit
1). Posyandu Terdaftar	162	Unit
2). Posyandu Tidak Aktif	162	Unit
2. PosKesDes	3	Unit
3. Puskesmas **	46	Unit
1). Induk	15	Unit
2). Pembantu	29	Unit
3). Keliling	1	Unit
4). Poliklinik	1	Unit
4. Rumah Sakit Umum Daerah **	2	Unit
1). Tipe A		Unit
2). Tipe B		Unit
3). Tipe C	1	Unit
4). Tipe D	1	Unit
5. Rumah Sakit Umum Swasta **		Unit
1). Tipe A		Unit
2). Tipe B		Unit
3). Tipe C		Unit
4). Tipe D		Unit
6. Rumah Sakit Khusus **		Unit
1). Rumah Sakit Bersalin		Unit
2). Rumah Sakit Jiwa		Unit
3). Rumah Sakit Ketergantungan Obat		Unit
4). Rumah Sakit Kusta		Unit
5). Rumah Sakit Mata		Unit
6). Rumah Sakit Bedah		Unit
7). Rumah Sakit Jantung		Unit
8). Rumah Sakit Paru		Unit
7. Klinik/Praktek Dokter	53	Unit
8. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1	Unit
9. Rumah Sakit Tentara		Unit
1). Rumah Sakit Angkatan Darat		Unit
2). Rumah Sakit Angkatan Udara		Unit
3). Rumah Sakit Angkatan Laut		Unit
4). Rumah Sakit POLRI		Unit
10. Layanan Air Bersih *		
1). Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunaka Layanan Air Bersih **	4.842	RT
1. Leding (Perpipaan)	4.842	RT
2. Sumur Lindung		RT
3. Sumur Tidak Terlindung		RT
4. Mata Air Terlindung		RT

Nama	Nilai	Satuan
5. Mata Air Tidak Terlindung		RT
6. Sungai		RT
7. Danau/Waduk		RT
8. Air Hujan		RT
9. Air Kemasan		RT
2). Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum		Penduduk
11. Balai Kesehatan Masyarakat		Unit
12. k. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan		Unit
II. Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi *		
1. Industri Farmasi Narkotika		Buah
2. Industri Farmasi Produksi Obat Tradisional		Buah
3. Gudang Farmasi	1	Unit
4. PBF (Pedagang Besar Farmasi)		Buah
5. Produk Alat Kesehatan		Buah
6. Penyalur Obat Kesehatan		Buah
7. Cabang Penyalur Alat Kesehatan		Cabang
III. Kesehatan Masyarakat *		
1. Jumlah Orang Sakit Jiwa	1	Orang
2. Jumlah Penderita Narkoba		Orang
3. Jumlah Balita *		
1). Jumlah Seluruh Balita Kurang Gizi	297	Balita
2). Jumlah Anak Balita 0 - 3 Thn	8.986	Balita
3). Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapat Perawatan	0	Balita
4). Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk	25	Balita
5). Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	25	Balita
4. Rata-Rata Jumlah Penduduk Yang Sakit		Orang
5. Jumlah Penduduk Meninggal Menurut Wabah (Total) *		
1). Menurut Wabah Muntaber		Jiwa
2). Menurut Wabah Demam Berdarah	2	Jiwa
3). Menurut Wabah Infeksi Saluran Pernafasan		Jiwa
4). Menurut Wabah Campak		Jiwa
5). Menurut Wabah Malaria		Jiwa
6). Menurut Wabah Lainnya		Jiwa
6. Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk	121	Jiwa
7. Jumlah Peserta Program KB Aktif		Jiwa
1). Laki - Laki	462	Jiwa
2). Perempuan	18.616	Jiwa
8. Jumlah Akseptor KB		Jiwa
1). Laki - Laki	93	Jiwa
2). Perempuan	2.286	Jiwa
9. Jumlah Pasangan Usia Subur	24.885	Pasang
10. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	21.453	Pasang
11. Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	3.291	Kali
12. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95,8	%
13. Pelayanan Anak Balita	10,752	Kali
14. Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	139	Kali
15. Pelayanan Nifas	3.106	Kali

Nama	Nilai	Satuan
16. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	344	Kali
17. Penjangkauan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	3.546	Orang
18. Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan	7.522	Kali
IV. Pedagang Kesehatan *		
1. Apotek	15	Unit
2. Toko Obat	39	Unit
V. Tenaga Kesehatan **	1.078	Orang
1. Dokter Umum	96	Orang
2. Dokter Spesialis	13	Orang
3. Dokter Gigi	25	Orang
4. Perawat	305	Orang
5. Bidan	204	Orang
6. Ahli Penyehatan Lingkungan	18	Orang
7. Sarjana Farmasi	12	Orang
8. Ahli Gizi	15	Orang
9. Analis Laboratorium	22	Orang
10. Ahli Rontgen	7	Orang
11. Bidan Desa	193	Orang
12. Asisten Apoteker	23	Orang
13. Pranata Laboratorium Kesehatan	22	Orang
14. Bidan Desa	22	Orang
15. Epidemiolog Kesehatan	4	Orang
16. Entomolog Kesehatan	0	Orang
17. Sanitarian	18	Orang
18. Administrator Kesehatan	0	Orang
19. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	36	Orang
20. Perawat Gigi	8	Orang
21. Nutrisi	15	Orang
22. Radiografer	7	Orang
23. perekam Medis	11	Orang
24. Teknisi Elektromedis	2	Orang
VI. Cakupan Komplikasi Kebidanan *		
1. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani		%
1). Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan	573	Orang
2). Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan	573	Orang
2. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,7	%
1). Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	3.104	Orang
2). Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	3.211	Orang
VII. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	51	%
1. Jumlah Desa/Kelurahan UCI	51	Desa
VIII. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: *		
1. TBC BTA		%
1). Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati	100	Orang
2). Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA	242	Orang

Nama	Nilai	Satuan
2. DBD		%
1). Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditangani sesuai SOP	404	Orang
2). Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan	404	Orang
3. Acute Flacid Paraly		%
1). Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemukan dan Diobati	1	Orang
2). Jumlah Perkiraan Penderita Baru Acute Flacid Paraly	1	Orang
4. Penyakit lainnya	0	%
1). Jumlah Penderita Penyakit Lainnya Yang Ditemukan dan Diobati	0	Orang
2). Jumlah Perkiraan Penderita Baru Penyakit Lainnya	0	Orang
IX. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	6.135	%
1. Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strategis	66,271	Orang
X. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	30,35	%
XI. Cakupan Kunjungan Bayi		%
1. Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.651	Bayi
2. Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama	3.055	Bayi
XII. Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemi	8	Desa
XIII. Jumlah Desa Siaga Aktif	51	Desa

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pendidikan, Kebudayaan

Nasional Pemuda dan

Olahraga

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pendidikan Umum *		
1. Jumlah Sekolah *		
1). Taman Kanak-Kanak (TK) **	42	Unit
1. Negeri **	2	Unit
1). Bangunan Baik	2	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	40	Unit
1). Bangunan Baik	40	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
2). Sekolah Luar Biasa (SLB) **	1	Unit
1. Negeri **	1	Unit
1). Bangunan Baik	1	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
3). Sekolah Dasar (SD) **		Unit
1. Negeri **	90	Unit
1). Bangunan Baik	90	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
2. Swasta **	5	Unit
1). Bangunan Baik	5	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
4). Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP) **		Unit
1. Negeri **	28	Unit
1). Bangunan Baik	28	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	1	Unit
1). Bangunan Baik	1	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
5). Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA) **		Unit
1. Negeri **	8	Unit
1). Bangunan Baik	8	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
2. Swasta **	2	Unit
1). Bangunan Baik	2	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
6). Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMK) **	8	Unit
1. Negeri **	4	Unit
1). Bangunan Baik	4	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit

Nama	Nilai	Satuan
2. Swasta **	4	Unit
1). Bangunan Baik	4	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
7). Perguruan Tinggi (PT) **		Unit
1. Negeri **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	3	Unit
1). Bangunan Baik	3	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
8). Lembaga Pendidikan Ketrampilan	14	Unit
9). Sekolah Menengah Kejuruan	8	Unit
10). Akademi atau Program Diploma	0	Unit
2. Jumlah Sekolah/Perguruan Agama *		
1). Madrasah Ibtidaiyah (MI) **		Unit
1. Negeri **	2	Unit
1). Bangunan Baik	2	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
2. Swasta **	6	Unit
1). Bangunan Baik	6	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2). Madrasah Tsanawiyah (MTs) **		Unit
1. Negeri **	1	Unit
1). Bangunan Baik	1	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	7	Unit
1). Bangunan Baik	7	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
3). Madrasah Aliyah (MA) **		Unit
1. Negeri **	1	Unit
1). Bangunan Baik	1	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
2. Swasta **	2	Unit
1). Bangunan Baik	2	Unit
2). Bangunan Tidak Baik		Unit
4). P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) **		Unit
1. Negeri **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	1	Unit
1). Bangunan Baik	1	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
5). P. Tinggi Agama Kristen/Teologi **		Unit
1. Negeri **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit

Nama	Nilai	Satuan
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
6). P. Tinggi Agama Katolik/Teologi **		Unit
1. Negeri **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
7). P. Tinggi Agama Hindu **		Unit
1. Negeri **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
2. Swasta **	0	Unit
1). Bangunan Baik	0	Unit
2). Bangunan Tidak Baik	0	Unit
3. Jumlah Kelas *		
1). TK dan Sejenisnya	147	Unit
2). SD dan Sejenisnya	729	Unit
3). SMP dan Sejenisnya	276	Unit
4). SMA dan Sejenisnya	126	Unit
5). PT dan Sejenisnya	22	Unit
6). Lembaga Pendidikan Ketrampilan	14	Unit
7). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	64	Unit
4. Jumlah Siswa / Mahasiswa *		
1). Taman Kanak-Kanak (TK) **	1.720	Orang
1. Negeri	212	Orang
2. Swasta	1.508	Orang
2). Taman Penitipan Anak (TPA) **	52	Orang
1. Negeri	0	Orang
2. Swasta	52	Orang
3). Sekolah Luar Biasa (SLB) **	64	Orang
1. Negeri	39	Orang
2. Swasta	25	Orang
4). Sekolah Dasar (SD) **	18.534	Orang
1. Negeri	17.949	Orang
2. Swasta	585	Orang
5). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) **	6.780	Orang
1. Negeri	6.755	Orang
2. Swasta	25	Orang
6). Sekolah Menengah Atas (SMA) **	3.404	Orang
1. Negeri	3.131	Orang
2. Swasta	273	Orang
7). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **	1.636	Orang
1. Negeri	1.325	Orang
2. Swasta	311	Orang
8). Perguruan Tinggi (PT) **	742	Orang
1. Negeri	1	Orang
2. Swasta	741	Orang

Nama	Nilai	Satuan
9). Lembaga Pendidikan Ketrampilan		Orang
5. Jumlah Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV **	1.968	Orang
1). Sekolah Dasar (SD) Sederajat	948	Orang
2). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Sederajat	548	Orang
3). Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat	472	Orang
6. Jumlah Guru dan Dosen *		
1). Taman Kanak-Kanak (TK) **	176	Orang
1. Negeri	18	Orang
2. Swasta	158	Orang
2). Sekolah Luar Biasa (SLB) **	12	Orang
1. Negeri	7	Orang
2. Swasta	5	Orang
3). Sekolah Dasar (SD) **	1.283	Orang
1. Negeri	1.225	Orang
2. Swasta	58	Orang
4). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) **	491	Orang
1. Negeri	480	Orang
2. Swasta	11	Orang
5). Sekolah Menengah Atas (SMA) **	270	Orang
1. Negeri	236	Orang
2. Swasta	34	Orang
6). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **	184	Orang
1. Negeri	125	Orang
2. Swasta	59	Orang
7). Perguruan Tinggi (PT) **	0	Orang
1. Negeri	0	Orang
2. Swasta	0	Orang
8). Lembaga Pendidikan Ketrampilan		Orang
7. Jumlah Guru Per Kelas *		
1). Taman Kanak-Kanak (TK) **	176	Orang
1. Negeri	18	Orang
2. Swasta	158	Orang
2). Sekolah Luar Biasa (SLB) **	12	Orang
1. Negeri	7	Orang
2. Swasta	5	Orang
3). Sekolah Dasar (SD) **	1.283	Orang
1. Negeri	1.225	Orang
2. Swasta	58	Orang
4). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) **	491	Orang
1. Negeri	480	Orang
2. Swasta	11	Orang
5). Sekolah Menengah Atas (SMA) **	270	Orang
1. Negeri	236	Orang
2. Swasta	34	Orang
6). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **	184	Orang
1. Negeri	125	Orang
2. Swasta	59	Orang
7). Madrasah Ibtidaiyah (MI) **	78	Orang

Nama	Nilai	Satuan
1. Negeri	26	Orang
2. Swasta	52	Orang
8). Madrasah Tsanawiyah (MTs) **	127	Orang
1. Negeri	21	Orang
2. Swasta	106	Orang
9). Madrasah Aliyah (MA) **	40	Orang
1. Negeri	16	Orang
2. Swasta	24	Orang
8. Jumlah Siswa / Mahasiswa Perguruan Agama *		
1). Raudatul Athfal (RA) **	822	Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta	822	Orang
2). Madrasah Ibtidaiyah (MI) **	919	Orang
1. Negeri	219	Orang
2. Swasta	700	Orang
3). Madrasah Tsanawiyah (MTs) **	798	Orang
1. Negeri	202	Orang
2. Swasta	596	Orang
4). Madrasah Aliyah (MA) **	302	Orang
1. Negeri	215	Orang
2. Swasta	87	Orang
5). P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) **	407	Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta	407	Orang
6). P. Tinggi Agama Kristen/Teologi **		Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta		Orang
7). P. Tinggi Agama Katolik/Teologi **		Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta		Orang
8). P. Tinggi Agama Hindu **		Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta		Orang
9. Jumlah Guru dan Dosen Perguruan Agama *		
1). Madrasah Ibtidaiyah (MI) **	78	Orang
1. Negeri	26	Orang
2. Swasta	52	Orang
2). Madrasah Tsanawiyah (MTs) **	127	Orang
1. Negeri	21	Orang
2. Swasta	106	Orang
3). Madrasah Aliyah (MA) **	40	Orang
1. Negeri	16	Orang
2. Swasta	24	Orang
4). P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) **	38	Orang
1. Negeri	0	Orang
2. Swasta	38	Orang
5). P. Tinggi Agama Kristen/Teologi **	0	Orang
1. Negeri	0	Orang

Nama	Nilai	Satuan
2. Swasta	0	Orang
6). P. Tinggi Agama Katolik/Teologi **		Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta		Orang
7). P. Tinggi Agama Budha **		Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta		Orang
8). P. Tinggi Agama Hindu **		Orang
1. Negeri		Orang
2. Swasta		Orang
10. Angka Partisipasi Sekolah *		
1). 7 - 12 Tahun	101,96	%
2). 13 - 15 Tahun	85,11	%
3). 16 - 18 Tahun	76,19	%
11. Angka Partisipasi Sekolah Usia Di Bawah 7 Tahun *		
1). Jenjang Prasekolah	17,07	%
2). Jenjang SD/MI/Sederajat	9,03	%
12. Angka Partisipasi Kasar *		
1). Jenjang SD/MI/Sederajat	102,75	%
2). Jenjang SMP/MTs/Sederajat	100,5	%
13. Angka Partisipasi Murni *		
1). Jenjang SD/MI/Paket A	94,68	%
2). Jenjang SMP/MTs/Paket B	76,95	%
3). Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	70,96	%
4). Jenjang Perguruan Tinggi		%
14. Rata-Rata Lama Sekolah	8,28	Tahun
15. Angka Putus Sekolah *		
1). APS SD/MI **	0,22	%
1. Jumlah capaian kinerja APS SD/MI	0	%
2. Jumlah seluruh APS SD/MI	0,22	%
2). APS SMP/MTS **	0,22	%
1. Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTS	0	%
2. Jumlah seluruh APS SMP/MTS	0,22	%
3). APS SMA/SMK/MA **	0,2	%
1. Jumlah capaian kinerja APS SMA/SMK/MA		%
2. Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA	0,2	%
16. Angka Kelulusan **	6.529	Orang
1). Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2.802	Orang
2). Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	2.232	Orang
3). Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	1.495	Orang
17. Angka Buta Huruf	1,91	%
18. Angka Melek Huruf	98,09	%
19. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dapat Membaca dan Menulis	102.990	Orang
20. Jumlah Capaian Kinerja Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf	0	%
21. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan *		

Nama	Nilai	Satuan
1). TK	0	Orang
2). SD	0	Orang
3). SMP	0	Orang
4). SMA	0	Orang
5). PT	0	Orang
22. Proporsi Penduduk Yang Tidak Pernah Sekolah **	0	Orang
1). 6 Tahun	0	Orang
2). 7-9 Tahun	0	Orang
3). 10 Tahun Ke Atas	0	Orang
4). 15 Tahun Ke Atas	0	Orang
5). 15-24 Tahun	0	Orang
6). 25-44 Tahun	0	Orang
7). 45 tahun	0	Orang
23. Angka Melanjutkan *		
1). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	2.675	Orang
2). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	2.034	Orang
3). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang Perguruan Tinggi	219	Orang
24. Jumlah Siswa Miskin **	353	Orang
1). Jenjang SD/MI/Sederajat		Orang
2). Jenjang SMP/MTs/Sederajat		Orang
3). Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat		Orang
4). Jenjang Perguruan Tinggi	353	Orang
25. Jumlah Sekolah Yang Menyediakan Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit
26. Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet	19	Unit
27. Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Yang Bersekolah **	41.600	Orang
1). 4 - 6 Tahun (PAUD)	8.476	Orang
2). 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat)	17.990	Orang
3). 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat)	8.415	Orang
4). 16 - 18 Tahun (SMA/SMK/MA Sederajat)	6.719	Orang
II. Seni dan Kebudayaan *		
1. Jumlah Group kesenian	0	Group
2. Jumlah Gedung kesenian	0	Unit
3. Museum	0	Unit
4. Pusat Kebudayaan	0	Unit
5. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	Penyeleng
6. Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	Unit
III. Cagar Budaya Yang Dilestarikan *		
1. Benda Cagar Budaya	0	Buah
2. Bangunan Cagar Budaya	0	Unit
3. Situs Cagar Budaya	0	Lokasi
4. Kawasan Cagar Budaya	0	Kawasan
IV. Pemuda dan Olah raga *		
1. Jumlah Klub Olah Raga	215	Klub
2. Jumlah Gedung Olah Raga	10	Unit
3. Organisasi Kepemudaan	60	Buah

Nama	Nilai	Satuan
4. Kegiatan Kepemudaan	3	Kegiatan
5. Organisasi Olahraga	19	Buah
6. Kegiatan Olahraga	4	Kegiatan
V. Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun		Kegiatan
VI. Perpustakaan *		
1. Jumlah Perpustakaan	52	Unit
2. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 th	6.064	Kunjungan
3. Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	151.510	Orang
4. Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	30.232	Unit
5. Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di Perpustakaan	10.109	Unit
VII. Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa *		
1. SD/MI/Sederajat		%
2. SMP/MTs/Sederajat		%
3. SMA/MA		%
4. SMK		%
VIII. Jumlah lulusan yang melanjutkan ke *		
1. SMP/MTs/Sederajat	95,47	%
2. SMA/MA	60,04	%
3. SMK	31,09	%
IX. Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional *		
1. SD/MI/Sederajat		%
2. SMP/MTs/Sederajat		%
3. SMA/MA		%
4. SMK		%
X. Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan *		
1. SD/MI/Sederajat		%
2. SMP/MTs/Sederajat		%
3. SMA/MA		%
4. SMK		%
XI. Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru *		
1. SMP/MTs/Sederajat	100	%
2. SMA/MA	100	%
3. SMK	100	%
XII. Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi		siswa
XIII. Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.		siswa
XIV. Cagar Budaya Yang Dimiliki Daerah *		
1. Benda Cagar Budaya	0	Buah
2. Bangunan Cagar Budaya	0	Unit
3. Situs Cagar Budaya	0	Lokasi
4. Kawasan Cagar Budaya	0	Kawasan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Kesejahteraan Sosial

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,01	Poin
II. Jumlah Penduduk miskin	9.198	orang
1. Pedesaan	0	Orang
2. Perkotaan	0	Orang
III. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *		
1. Pedesaan	0,85	%
2. Perkotaan		%
IV. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) *		
1. Pedesaan	0	Orang
2. Perkotaan		Orang
V. Jamkesmas/Jamkesda *		
1. Jumlah KK Penerima Jamkesmas/Jamkesda	8.800	KK
2. Jumlah Surat Keterangan Miskin	0	Unit
VI. Kemiskinan *		
1. Garis Kemiskinan *		
1). Garis Kemiskinan Pedesaan	0	Rp/Kap/Bl
2). Garis Kemiskinan Perkotaan	0	Rp/Kap/Bl
2. Penduduk Di bawah Garis Kemiskinan	0	Jiwa
3. Beras Untuk Penduduk Miskin *		
1). KK Penerima Raskin	5.105	KK
2). Persentase RT Penerima Raskin	100	%
3). Realisasi Beras Raskin	0,0012	Juta/Ton
4). Harga Beras Raskin	8.047	Rp/Kg
VII. Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan **	0	KK
1. Keluarga Prasejahtera	0	KK
2. Keluarga Sejahtera Tahap 1	0	KK
3. Keluarga Sejahtera Tahap 2	0	KK
4. Keluarga Sejahtera Tahap 3	0	KK
5. Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus	0	KK
VIII. Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP **	6	Kali
1. LSM	0	Kegiatan
2. Ormas	6	Kegiatan
3. OKP	0	Kegiatan
IX. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) *		
1. Karang Taruna	62	Buah
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	510	Orang
3. Organisasi Sosial	26	Buah
4. Lembaga swadaya masyarakat	60	Buah
X. Jumlah PMKS **	16.510	Buah
1. PMKS Yang Tertangani	5.067	Buah
2. PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	7.347	Buah
3. PMKS Yang Diberikan Bantuan	4.096	Buah

Nama	Nilai	Satuan
XI. Penduduk Penyandang Masalah Sosial *		
1. Penduduk rawan Sosial dan Sarana *		
1). Anak Jalanan	0	Jiwa
2). Penderita Sakit Jiwa	51	Jiwa
3). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	0	Jiwa
4). Jumlah Penderita HIV/AIDS	0	Jiwa
5). Jumlah Pecandu Narkoba	0	Jiwa
6). Sarana Rehabilitasi Sosial	0	Jiwa
7). Fakir Miskin	29.210	Jiwa
8). Bayi Terlantar	2	Jiwa
9). Anak Terlantar	2	Jiwa
10). Lanjut Usia Terlantar	424	Jiwa
11). Komunitas Adat Terpencil		Jiwa
12). Penyandang Tuna Netra	47	Jiwa
13). Penyandang Tuna Rungu	16	Jiwa
14). Penyandang Tuna Wicara	48	Jiwa
15). Penyandang Tuna Wicara-Rungu	0	Jiwa
16). Penyandang Tuna Daksa	210	Jiwa
17). Penyandang Tuna Grahita	125	Jiwa
18). Penyandang Cacat Jiwa	0	Jiwa
19). Penyandang Cacat Ganda	0	Jiwa
20). Tuna Susila	123	Jiwa
21). Bekas Narapidana	12	Jiwa
22). Pengidap HIV/AIDS	0	Jiwa
23). Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	Jiwa
2. Jumlah Panti Asuhan *		
1). Panti Sosial Asuhan Anak	11	Buah
2). Panti Sosial Petirahan Anak	0	Buah
3). Panti Sosial Bina Remaja	0	Buah
4). Panti Sosial Tresna Wirda	1	Buah
5). Panti Sosial Bina Netra	0	Buah
6). Panti Sosial Bina Daksa	0	Buah
7). Panti Sosial Bina Grahita	0	Buah
8). Panti Sosial Bina Laras	0	Buah
9). Panti Sosial Bina Rungu Wicara	0	Buah
10). Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis	0	Buah
11). Panti Sosial Marsudi Putra	0	Buah
12). Panti Sosial Pamardi Putra	0	Buah
13). Panti Sosial Karya Wanita	0	Buah
14). Panti Sosial Bina Karya	0	Buah
15). Panti Sosial Rehabilitasi	0	Buah
3. Pusat Rehabilitasi Narkoba	0	Buah
4. Rumah singgah	2	Buah
XII. Jumlah PKK **	684	Unit
1. Jumlah Kelompok Binaan PKK	19	Unit
2. Jumlah PKK Aktif	665	Unit
XIII. Pelayanan Ketenagakerjaan **	0	Unit
1. Balai latihan Kerja	0	Unit

Nama	Nilai	Satuan
2. Perizinan Ketenagakerjaan	0	Unit
3. Pusat Informasi Ketenagakerjaan	0	Unit
XIV. Indeks Gini	0,364	Poin
XV. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	0	Poin
XVI. Indeks Ketimpangan Williamson	0,91	Poin

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Agama

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Pemeluk Agama **	160.422	Orang
1. Islam	138.455	Orang
2. Kristen	8.981	Orang
3. Katolik	3.452	Orang
4. Hindu	243	Orang
5. Budha	8.591	Orang
6. Konghucu	600	Orang
7. Lainnya	100	Orang
II. Sarana Ibadah *		
1. Masjid	167	Buah
2. Langgar/Mushola	175	Buah
3. Gereja Kristen	16	Buah
4. Gereja Katolik/Kapel	11	Buah
5. Pura/Kuil/Sanggah	1	Buah
6. Vihara/Cetya/Klenteng	30	Buah
III. Jumlah Jemaah Haji *		
1. Kuota	0	Orang
2. Pemberangkatan	56	Orang
IV. Jumlah KUA **	0	Unit
1. Kondisi Baik	0	Unit
2. Rusak Berat	0	Unit
3. Rusak Ringan	0	Unit
V. Jumlah Penyuluh Agama **	0	Orang
1. Honorer	0	Orang
2. PNS dan Non PNS	0	Orang
VI. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan **	0	Buah
1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	0	Buah
2. Sekolah Minggu	2	Buah
3. Pondok Pesantren *		
1). Jumlah Pondok Pesantren	2	Buah
2). Jumlah Santri	263	Orang

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, Perikanan,
Peternakan, Perkebunan
2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pertanian *		
1. Padi Sawah *		
1). Luas Tanam	21	Ha
2). Luas Panen	15	Ha
3). Produksi Gabah	81,5	Ton
4). Produksi Beras	125,3	Ton
5). Produktivitas	21	Kw/Ha
6). Jumlah Konsumsi Beras	0	Ton
2. Padi Ladang *		
1). Luas Tanam	0	Ha
2). Luas Panen	0	Ha
3). Produksi Gabah	0	Ton
4). Produksi Beras	0	Ton
5). Produktivitas	0	Kw/Ha
6). Jumlah Konsumsi Beras	0	Ton
3. Jagung *		
1). Luas Tanam	279	Ha
2). Luas Panen	264	Ha
3). Produksi	312	Ton
4). Produktivitas	11,81	Kw/Ha
5). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4. Kacang Kedelai *		
1). Luas Tanam	0	Ha
2). Luas Panen	0	Ha
3). Produksi	0	Ton
4). Produktivitas	0	Kw/Ha
5). Jumlah Konsumsi	0	Ton
5. Kacang Hijau *		
1). Luas Tanam	0	Ha
2). Luas Panen	0	Ha
3). Produksi	0	Ton
4). Produktivitas	0	Kw/Ha
5). Jumlah Konsumsi	0	Ton
6. Kacang Tanah *		
1). Luas Tanam	40	Ha
2). Luas Panen	31	Ha
3). Produksi	37,5	Ton
4). Produktivitas	121	Kw/Ha
5). Jumlah Konsumsi	0	Ton
7. Ubi Kayu *		
1). Luas Tanam	234	Ha

Nama	Nilai	Satuan
2). Luas Panen	133	Ha
3). Produksi	4.689	Ton
4). Produktivitas	352,55	Kw/Ha
5). Jumlah Konsumsi	0	Ton
8. Ubi Jalar *		
1). Luas Tanam	103	Ha
2). Luas Panen	63	Ha
3). Produksi	693	Ton
4). Produktivitas	110	Kw/Ha
5). Jumlah Konsumsi	0	Ton
9. Luas Lahan Pertanian **	3.777	Ha
1). Lahan Basah	80	Ha
2). Lahan Kering	3.105	Ha
3). Lahan Dataran Tinggi	592	Ha
10. Jenis Irigasi Sawah *		
1). Teknis	0	Ha
2). Setengah Teknis	0	Ha
3). Sederhana	28	Ha
4). Pengairan Desa / Non PU	0	Ha
5). Tadah Hujan	0	Ha
6). Lebak/Polder dan lainnya	0	Ha
11. Industri Pengolahan Hasil Pertanian *		
1). Jumlah Perusahaan	0	Unit
2). Omset Produksi	0	Juta
II. Hortikultura *		
1. Mangga *		
1). Luas Areal	423	Ha
2). Jumlah Produksi	126,14	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	100,11	Kw/Ha
2. Jeruk *		
1). Luas Areal	28	Ha
2). Jumlah Produksi	25,14	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	100,93	Kw/Ha
3. Pepaya *		
1). Luas Areal	135	Ha
2). Jumlah Produksi	356	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	400	Kw/Ha
4. Pisang *		
1). Luas Areal	273	Ha
2). Jumlah Produksi	406	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	299,93	Kw/Ha
5. Nanas *		
1). Luas Areal	79	Ha
2). Jumlah Produksi	1.554	Ton

Nama	Nilai	Satuan
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	50,129	Kw/Ha
6. Durian *		
1). Luas Areal	253	Ha
2). Jumlah Produksi	492,6	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	26,48	Kw/Ha
7. Manggis *		
1). Luas Areal	63	Ha
2). Jumlah Produksi	34	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	20	Kw/Ha
8. Melon *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	0	Kw/Ha
9. Alpukat *		
1). Luas Areal	46	Ha
2). Jumlah Produksi	14	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	23,57	Kw/Ha
10. Buah Naga *		
1). Luas Areal	72	Ha
2). Jumlah Produksi	90	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	79,5	Kw/Ha
11. Belimbing *		
1). Luas Areal	10	Ha
2). Jumlah Produksi	10,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Luas Areal	56	Ha
5). Produktivitas perLuas	105	Kw/Ha
12. Dukuh/Langsar *		
1). Luas Areal	27	Ha
2). Jumlah Produksi	67	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	34	Kw/Ha
13. Jambu Biji *		
1). Luas Areal	24	Ha
2). Jumlah Produksi	67	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	51,53	Kw/Ha
14. Jambu Air *		
1). Luas Areal	64	Ha
2). Jumlah Produksi	71,1	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	25,39	Kw/Ha

Nama	Nilai	Satuan
15. Nangka/Cempedak *		
1). Luas Areal	553	Ha
2). Jumlah Produksi	2.946	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	111,18	Kw/Ha
16. Salak *		
1). Luas Areal	101	Ha
2). Jumlah Produksi	808,2	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	132,49	Kw/Ha
17. Rambutan *		
1). Luas Areal	315	Ha
2). Jumlah Produksi	617,4	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	56,12	Kw/Ha
18. Sawo *		
1). Luas Areal	87	Ha
2). Jumlah Produksi	95,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	25,81	Kw/Ha
19. Sirsak *		
1). Luas Areal	34	Ha
2). Jumlah Produksi	80,8	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	67,33	Kw/Ha
20. Markisa *		
1). Luas Areal	3	Ha
2). Jumlah Produksi	6	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	60	Kw/Ha
21. Sukun *		
1). Luas Areal	174	Ha
2). Jumlah Produksi	100,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	26,44	Kw/Ha
22. Melinjo *		
1). Luas Areal	94	Ha
2). Jumlah Produksi	257	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
4). Produktivitas perLuas	75,58	Kw/Ha
23. Bawang Merah *		
1). Luas Areal	3	Ha
2). Jumlah Produksi	2,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
24. Kentang *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton

Nama	Nilai	Satuan
25. Kubis *		
1). Luas Areal	1	Ha
2). Jumlah Produksi	2,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
26. Cabai *		
1). Luas Areal	180	Ha
2). Jumlah Produksi	790	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
27. Petsai/Sawi *		
1). Luas Areal	251	Ha
2). Jumlah Produksi	2.892	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
28. Wortel *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi		Ton
29. Bawang Putih *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
30. Daun Bawang *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi		Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
31. Kembang Kol *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
32. Lobak *		
1). Luas Areal		Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
33. Kacang Merah *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
34. Kacang Panjang *		
1). Luas Areal	208	Ha
2). Jumlah Produksi	1.252	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
35. Semangka *		
1). Luas Areal	65	Ha
2). Jumlah Produksi	1.652	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
36. Tomat *		
1). Luas Areal	6	Ha
2). Jumlah Produksi	30,2	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton

Nama	Nilai	Satuan
37. Terung *		
1). Luas Areal	55	Ha
2). Jumlah Produksi	439,9	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
38. Buncis *		
1). Luas Areal	47	Ha
2). Jumlah Produksi	269,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
39. Ketimun *		
1). Luas Areal	167	Ha
2). Jumlah Produksi	2.976	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
40. Labu Siam *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
41. Kangkung *		
1). Luas Areal	242	Ha
2). Jumlah Produksi	1.946	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
42. Bayam *		
1). Luas Areal	193	Ha
2). Jumlah Produksi	724	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
43. Jahe *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
44. Laos/Lengkuas *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
45. Kencur *		
1). Luas Areal	120	Ha
2). Jumlah Produksi	73	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
46. Kunyit *		
1). Luas Areal	617	Ha
2). Jumlah Produksi	30,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
47. Serai *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi		Ton
48. Blewah *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Jumlah Produksi	0	Ton
3). Jumlah Konsumsi		Ton

Nama	Nilai	Satuan
49. Petai *		
1). Luas Areal	116	Ha
2). Jumlah Produksi	340	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
50. Jengkol *		
1). Luas Areal	214	Ha
2). Jumlah Produksi	1.821	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
51. Bawang Daun *		
1). Luas Areal	16	Ha
2). Jumlah Produksi	2,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	0	Ton
52. Cabe *		
1). Luas Areal	72	Ha
2). Jumlah Produksi	75,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi		Ton
53. Jamur *		
1). Luas Areal	2	Ha
2). Jumlah Produksi	0,09	Ton
3). Jumlah Konsumsi		Ton
III. Perkebunan *		Ha
1. Karet *		
1). Luas Areal	4.322	Ha
2). Luas Tanam	4.322	Ha
3). Jumlah Produksi	5.886,95	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
2. Teh *		
1). Luas Areal		Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
3. Kopi *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi		Ton
4. Sawit *		
1). Luas Areal	1.481	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	4.360,4	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
5. Tembakau *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Luas Tanam		Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
6. Kakao *		
1). Luas Areal	20	Ha

Nama	Nilai	Satuan
2). Luas Tanam	20	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi		Ton
7. Lada *		
1). Luas Areal	6,5	Ha
2). Luas Tanam	6,5	Ha
3). Jumlah Produksi	18	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
8. Vanili *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Luas Tanam	536	Ha
3). Jumlah Produksi	26	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
9. Tebu *		
1). Luas Areal	1.269	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi		Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
10. Kelapa *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
11. Kelapa Sawit *		
1). Luas Areal	1.095	Ha
2). Luas Tanam	1.095	Ha
3). Jumlah Produksi	4.346	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
12. Pala *		
1). Luas Areal		Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
13. Kelapa Dalam *		
1). Luas Areal	4.080	Ha
2). Luas Tanam	4.080	Ha
3). Jumlah Produksi	4.908	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
14. Cengkeh *		
1). Luas Areal	362	Ha
2). Luas Tanam	362	Ha
3). Jumlah Produksi	526	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
15. Kina *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton

Nama	Nilai	Satuan
16. Jambu Mete *		
1). Luas Areal	0	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi	0	Ton
4). Jumlah Konsumsi	0	Ton
17. Kapuk *		
1). Luas Areal		Ha
2). Luas Tanam	233.645	Ha
3). Jumlah Produksi	145.055	Ton
4). Jumlah Konsumsi		Ton
18. Aren *		
1). Luas Areal	150	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi		Ton
4). Jumlah Konsumsi	12.950	Ton
19. Pandan *		
1). Luas Areal	21.750	Ha
2). Luas Tanam	0	Ha
3). Jumlah Produksi		Ton
4). Jumlah Konsumsi		Ton
20. Kapolaga *		
1). Luas Areal		Ha
2). Luas Tanam		Ha
3). Jumlah Produksi		Ton
4). Jumlah Konsumsi		Ton
21. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan *		
1). Jumlah Industri Pengolahan	4	Unit
IV. Peternakan *		
1. Ternak Sapi Potong *		
1). Jumlah Populasi	508	Ekor
2). Jumlah Pemotongan per Tahun	289	Ekor
3). Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	59	%
4). Rata-Rata Kepemilikan per KK	6	Ekor
2. Ternak Sapi Perah *		
1). Jumlah Populasi		Ekor
2). Jumlah Produksi Susu per Tahun		liter
3). Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun		%
4). Rata-Rata Kepemilikan per KK		Ekor
5). Rata-Rata Produktivitas per Ekor per Hari		liter
3. Ternak Kecil *		
1). Jumlah Populasi Kambing	1.106	Ekor
2). Jumlah Populasi Domba	0	Ekor
3). Jumlah Populasi Babi	310	Ekor
4). Jumlah Populasi Kerbau	0	Ekor
5). Jumlah Populasi Kuda	0	Ekor
6). Jumlah Populasi Rusa	102	Ekor
7). Jumlah Populasi Kelinci	50	Ekor
8). Jumlah Populasi Lainnya		Ekor

Nama	Nilai	Satuan
4. Unggas *		
1). Jumlah Ayam Buras	183,485	Ekor
2). Ayam Petelur *		
1. Jumlah	198,9	Ekor
2. Jumlah Produksi Telur	16,9	Ton
3. Jumlah Peternak	21	Orang
4. Rata-Rata Kepemilikan per Peternak	9.470	Ekor
3). Ayam Pedaging *		
1. Jumlah	600	Ekor
2. Jumlah Peternak	40	Orang
3. Jumlah Produksi	540	Ton
4. Rata-Rata Kepemilikan per Peternak	15	Ekor
4). Itik *		
1. Jumlah Populasi	7.338	Ekor
2. Jumlah Peternak	380	Orang
3. Jumlah Produksi	5,26	Ton
4. Rata-Rata Kepemilikan per Peternak	19	Ekor
5). Jenis Lainnya *		
1. Jumlah Populasi Itik manila	50	Ekor
2. Jumlah Populasi Angsa	100	Ekor
3. Jumlah Populasi Burung Dara	200	Ekor
4. Jumlah Populasi Burung Puyuh	1.000	Ekor
5. Industri Peternakan *		
1). Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	0	Unit
2). Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong	0	Unit
3). Jumlah Pabrik Pakan Ternak	0	Unit
4). Jumlah Industri Pengolah Susu (IPS)	0	Unit
6. Jumlah Koperasi Peternakan	0	Unit
7. Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	1	Unit
V. Kelautan dan Perikanan *		
1. Perikanan Laut *		
1). Jumlah Tangkapan Ikan	3.386	Ton
2). Jumlah Kapal Penangkap Ikan *		
1. Perahu Tanpa Motor	1.407	Unit
2. Perahu Motor Tempel	206	Unit
3. Kapal Motor	6.709	Unit
3). Jumlah Tempat Pelelangan Ikan		Unit
2. Hasil Laut *		
1). Produksi *		
1. Garam		Ton
2. Rajungan		Ton
3. Kepiting		Ton
4. Ubur-ubur		Ton
5. Kerang		Ton
6. Ikan Krapu		Ton
7. Teripang		Ton
8. Tuna		Ton
9. Udang		Ton

Nama	Nilai	Satuan
10. Lobster		Ton
11. Kakap Merah		Ton
12. Rumpaut Laut		Ton
13. Mutiara		Ton
14. Lainnya		Ton
2). Volume Ekspor *		
1. Garam		Ton
2. Rajungan		Ton
3. Kepiting		Ton
4. Ubur-ubur		Ton
5. Kerang		Ton
6. Ikan Krapu		Ton
7. Teripang		Ton
8. Tuna		Ton
9. Udang		Ton
10. Lobster		Ton
11. Kakap Merah		Ton
12. Rumpaut Laut		Ton
13. Mutiara		Ton
14. Lainnya		Ton
3). Nilai Ekspor *		
1. Garam		Juta
2. Rajungan		Juta
3. Kepiting		Juta
4. Ubur-ubur		Juta
5. Kerang		Juta
6. Ikan Krapu		Juta
7. Teripang		Juta
8. Tuna		Juta
9. Udang		Juta
10. Lobster		Juta
11. Kakap Merah		Juta
12. Rumpaut Laut		Juta
13. Mutiara		Juta
14. Lainnya		Ton
4). Industri Pengolahan *		
1. Garam		Unit
2. Rumpaut Laut		Unit
3. Lainnya		Unit
5). Luas Areal *		
1. Garam		Unit
2. Rumpaut Laut		Unit
3. Lainnya		Unit
3. Perikanan Darat *		
1). Tambak *		
1. Luas Areal		Ha
2. Jumlah Produksi Udang Windu		Ton
3. Jumlah Produksi Udang		Ton

Nama	Nilai	Satuan
4. Jumlah Produksi Ikan Patin		Ton
5. Jumlah Produksi Ikan Bandeng		Ton
6. Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya		Ton
7. Nilai Produksi Usaha Tambak		Juta
2). Kolam Air Deras *		
1. Luas Areal		Ha
2. Jumlah Produksi Ikan Mas		Ton
3. Jumlah Produksi Ikan Mujair		Ton
4. Jumlah Produksi Ikan Patin		Ton
5. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya		Ton
6. Nilai Produksi Usaha Kolam Air Deras		Juta
3). Kolam Air Tenang *		
1. Luas Areal		Ha
2. Jumlah Produksi Ikan Sidat		Ton
3. Jumlah Produksi Ikan Nila		Ton
4. Jumlah Produksi Ikan Lele		Ton
5. Jumlah Produksi Ikan Gurami		Ton
6. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya		Ton
7. Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang		Juta
4). Keramba/Siring *		
1. Luas Areal	231	Ha
2. Jumlah Karamba	95	Petak
3. Jumlah Produksi Ikan Karper	3	Ton
4. Jumlah Produksi Ikan Tawes		Ton
5. Jumlah Produksi Ikan Sepat	0	Ton
6. Jumlah Produksi Ikan Gabus	0	Ton
7. Jumlah Produksi Ikan Gurami	0	Ton
8. Jumlah Produksi Ikan Betok	0	Ton
9. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	0	Ton
10. Nilai Produksi Usaha Keramba / Siring		Juta
5). Sawah/Mina padi *		
1. Luas Areal	0	Ha
2. Jumlah Sawah	2.902	Petak
3. Jumlah Produksi Ikan Mas	0	Ton
4. Jumlah Produksi Ikan Nila	10	Ton
5. Jumlah Produksi Ikan Hias	31	Ton
6. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	134	Ton
7. Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi	0	Juta
6). Jaring Apung *		
1. Luas Areal	181.151	Ha
2. Jumlah Jaring Apung		Unit
3. Jumlah Produksi Ikan Kerapu Lumpur	219.850	Ton
4. Jumlah Produksi Ikan Kakap Putih	480.994	Ton
5. Jumlah Produksi Ikan Kakap Merah	30	Ton
6. Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	15.000	Ton
7. Nilai Produksi Usaha Jaring Apung		Juta
7). Penangkapan ikan Perairan Umum *		
1. Luas Areal	36	Ha

Nama	Nilai	Satuan
2. Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	14.678	Ton
3. Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	30.000	Juta
4. Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Tawar *		
1). Jumlah Perusahaan	6.498	Unit
2). Omset Produksi	64	Juta
5. Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Laut *		
1). Jumlah Perusahaan	35	Unit
2). Omset Produksi		Juta
6. Balai Benih Ikan (BBI) *		
1). Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)		Unit
2). Produksi Usaha Pembenihan	113	Juta
3). Nilai Produksi Usaha Pembenihan		Juta
7. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) *		
1). Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)		Unit
2). Produksi Usaha Pembenihan	35	Juta
3). Nilai Produksi Usaha Pembenihan		Juta
8. Jumlah produksi ikan **	51.475,24	Ton
1). Perikanan laut	51.475,24	Ton
2). Perikanan darat	0	Ton
9. Target Daerah Produksi Ikan **	0	Ton
1). Perikanan laut	0	Ton
2). Perikanan darat	0	Ton
10. Jumlah Konsumsi Ikan **	4.363	Ton
1). Perikanan laut		Ton
2). Perikanan darat	4.363	Ton
11. Target Daerah konsumsi Ikan **	626.148	Ton
1). Perikanan laut	626.148	Ton
2). Perikanan darat	0	Ton
VI. Kehutanan *		
1. Hasil Hutan Non HPH *		
1). Kayu Bulat	0	M3
2). Kayu Gergajian	0	M3
3). Kayu Olahan	23,1	M3
2. Hasil Hutan Ikutan *		
1). Rotan	0	Ton
2). Gaharu	0	Kg
3). Getah Jelutung	0	Kg
4). Gando Rukem	0	Kg
5). Kemiri		Kg
6). Kenari	1.098	Kg
7). Kemenyan	314	Kg
8). Asam	556.297	Kg
9). Minyak Lawang	0	Liter
10). Kulit Kayu Medang Keladi		Kg
11). Bambu	0	Batang
12). Sarang Burung Walet	0	Kg
13). Madu	0	Liter
14). Sagu	0	Kg

Nama	Nilai	Satuan
15). Nipah/Nira Gula		Kg
16). Ijuk	0	Kg
17). Kemedangan	0	Kg
18). Biga	0	Kg
19). Kayu Manis	0	M3
20). Kayu Putih		Kg
3. Luas Lahan Reboisasi *		
1). Target	271	Ha
2). Realisasi	271	Ha
4. Luas Lahan Penghijauan *		
1). Pembuatan Baru		Ha
2). Pemeliharaan	3,94	Ha
5. Industri Pengolahan Hasil Hutan	0	Buah
6. Luas Lahan Yang Dapat Dikembangkan Untuk Hutan Produksi *		
1). Terbatas	4.856	Ha
2). Tetap	13,53	Ha
3). Dapat Dikonversi	4.687	Ha
7. Luas Land Use (Penggunaan Lahan) Lainnya Di Luar Hutan Negara	71,966	Ha
VII. Kelompok Sumber Daya Sosial *		
1. Perkumpulan Petani Pemakai Air	0	Kelompok
2. Kelompok Tani	254	Kelompok
3. Kontak Tani Nelayan Andalan	0	Kelompok
4. Karang Taruna	0	Kelompok
5. Lembaga Penyuluh Pertanian	7	Kelompok
6. Kelompok Usaha Ternak	157	Kelompok
7. Kelompok Nelayan	0	Kelompok
8. Jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan Pemda	0	Kelompok
9. Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemda	0	Kelompok
VIII. Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani	21	Ton
IX. Jumlah Produksi Ikan Hasil Kelompok Nelayan	0	Ton
X. Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun	0	Kg
XI. Luas Areal Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Di Daerah	40	Ha

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pertambangan dan Energi

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pertambangan *		
1. Minyak Bumi dan Gas Alam *		
1). Minyak Mentah *		
1. Total Produksi		Barel
2. Realisasi Lifting		Barel
3. BUMN *		
1). Jumlah Kilang		Unit
2). Jumlah Produksi		Barel
4. BUMD *		
1). Jumlah Kilang		Unit
2). Jumlah Produksi		Barel
5. PMA *		
1). Jumlah Kilang		Unit
2). Jumlah Produksi		Barel
2). Gas Alam *		
1. Total Produksi		M3
2. Realisasi Lifting		MMBTU
3. BUMN *		
1). Jumlah Kilang		Unit
2). Jumlah Produksi		Barel
4. BUMD *		
1). Jumlah Kilang		Unit
2). Jumlah Produksi		Barel
5. PMA *		
1). Jumlah Kilang		Unit
2). Jumlah Produksi		Barel
2. Mineral *		
1). Batubara *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
2). Timah *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
3). Besi/Baja *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
4). Tembaga *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
5). Biji Nikel *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
6). Emas *		

Nama	Nilai	Satuan
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
7). Perak *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
8). Gamping *		
1. Produksi Gamping		Ton
2. Produksi Kapur		Ton
3. Jumlah Perusahaan		Buah
9). Andesit *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
10). Marmer *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
11). Granit *		
1. Produksi	616.619.980	Ton
2. Jumlah Perusahaan	2	Buah
12). Basalt *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
13). Aspal *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
14). Pasir *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan	2	Buah
15). Batu Split *		
1. Produksi		Ton
2. Jumlah Perusahaan		Buah
II. Energi *		
1. Sumber Energi Listrik *		
1). PLTA *		
1. Jumlah		Unit
2. Kapasitas		Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah		Km2
2). PLTG *		
1. Jumlah	1	Unit
2. Kapasitas	3	Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah	0	Km2
3). PLTU *		
1. Jumlah	1	Unit
2. Kapasitas	2	Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah	0	Km2
4). PLTD *		
1. Jumlah	30	Unit
2. Kapasitas	1.290	Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah	0	Km2

Nama	Nilai	Satuan
5). PLTS *		
1. Jumlah	192	Unit
2. Kapasitas	71	Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah	0	Km2
6). PLTMH *		
1. Jumlah		Unit
2. Kapasitas		Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah		Km2
7). PLTP *		
1. Jumlah		Unit
2. Kapasitas		Kva/Kwh
3. Cakupan Wilayah		Km2
2. Jangkauan Pelayanan Energi Listrik *		
1). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	26.213	KK
2). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	2.425	KK
3). Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	9.275	KK
4). Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)		RT
**		
1. Rumah Tangga dengan daya 450 watt		RT
2. Rumah Tangga dengan daya 900 watt		RT
3. Rumah Tangga dengan daya 1300 watt		RT
4. Rumah Tangga dengan daya 2200 watt		RT
5. Rumah Tangga dengan daya >2200 watt		RT
5). Daya Listrik Terpasang		GWH
6). Jumlah Kebutuhan Listrik		GWH
3. Sarana Pelayanan Bahan Bakar *		
1). SPBU	4	Buah
2). Depo/Agen Minyak Tanah	4	Buah
3). UPPDN Pertamina	2	Buah
4). Agen LPG	32	Buah
4. Konsumsi Bahan Bakar per Kapita per Hari *		
1). Bensin	76.100	Liter
2). Minyak Tanah		Liter
3). Solar	78.334	Liter
4). BBG		Liter
5). Elpiji		Kg

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Lingkungan Hidup, Tata

Ruang dan Pertanahan

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Lingkungan Hidup *		
1. Jumlah Kawasan Lindung *		
1). Taman Nasional		Buah
2). Cagar Alam		Buah
3). Hutan Suaka Alam		Buah
4). Hutan Lindung	6	Buah
5). Cagar Budaya		Buah
6). Taman Hutan Raya		Buah
7). Kebun Raya		Buah
2. Pencemaran *		
1). Tanah	3	Ha
2). Air		Ha
3). Udara		Ha
4). Laut		Ha
3. Plasma Nutfah dilindungi *		
1). Hewan	7	Jenis
2). Tumbuhan		Jenis
4. Plasma Nutfah Terancam Punah *		
1). Hewan	7	Jenis
2). Tumbuhan		Jenis
5. Plasma Nutfah Endemik *		
1). Hewan		Jenis
2). Tumbuhan		Jenis
6. Terumbu Karang *		
1). Luas Terumbu Karang		Ha
2). Kondisi Terumbu Karang *		
1. Baik Sekali (75-100%)		Ha
2. Baik (50-74,9%)		Ha
3. Sedang (25-49,5%)		Ha
4. Buruk (0-24,9%)		Ha
7. Hutan Bakau *		
1). Luas Hutan Bakau		Ha
2). Kondisi Hutan Bakau *		
1. Baik		Ha
2. Sedang		Ha
3. Rusak		Ha
8. Hutan Padang Lamun *		
1). Luas Hutan Padang Lamun		Ha
2). Kondisi Hutan Padang Lamun *		
1. Baik		Ha
2. Sedang		Ha
3. Rusak		Ha

Nama	Nilai	Satuan
II. Kerusakan Lingkungan Hidup *		
1. Intrusi Air Laut		Ha
2. Abrasi Pantai		Ha
3. Reklamasi Batu Bara		Ha
4. Erosi		Ha
5. Banjir		Ha
6. Gempa Bumi		Ha
7. Tsunami		Ha
8. Badai		Ha
9. Kawasan Hutan **	600	Ha
1). Kebakaran Hutan	150	Ha
2). Deforestasi (Penggundulan Hutan)	450	Ha
10. Area Penambangan Liar		Ha
11. Kekeringan		Ha
12. Lainnya		Ha
III. Pelestarian Lingkungan Hidup *		
1. Peremajaan Terumbu Karang		Ha
2. Penanaman Hutan Bakau		Ha
3. Reboisasi		Ha
4. Penghijauan **	0	Ha
1). Jumlah Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	0	Ha
2). Jumlah Kasus Lingkungan Yang Diselesaikan Pemda	0	Kasus
3). Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ada	0	Kasus
5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	267	Ha
6. Penambangan Liar Yang Ditertibkan	1	Ha
IV. Tata Ruang *		
1. Luas Kawasan Lindung **		Ha
1). Hutan		Ha
2). Bukan Hutan		Ha
2. Kawasan Pemukiman *		
1). Luas Kawasan Pemukiman		Ha
2). Jumlah Kawasan Pemukiman Penduduk		Kawasan
3). Jumlah Seluruh Kawasan Pemukiman Penduduk Yang belum dilalui Kendaraan Roda 4		Kawan
3. Luas Kawasan Industri		Ha
4. Luas Lahan Produktif		Ha
5. Luas Lahan Kritis		Ha
6. Luas Lahan Hutan Rakyat		Ha
7. Luas ruang terbuka hijau	192.801	Ha
8. Rencana Peruntukan		Ha
9. Realisasi RTRW		Ha
10. Luas seluruh wilayah budidaya		Ha
11. Luas wilayah produktif		Ha
12. Luas wilayah perkotaan		Ha
V. Pertanahan *		
1. Jumlah Tanah yang Bersertifikat *		
1). Hak Milik		Buah

Nama	Nilai	Satuan
2). Hak guna bangunan		Buah
3). Hak Guna Usaha		Buah
4). Hak Pakai		Buah
5). Girik		Buah
2. Luas Tanah Yang Bersertifikat *		
1). Hak Milik		Ha
2). Hak Guna Bangunan		Ha
3). Hak Guna Usaha		Ha
4). Hak Pakai		Ha
5). Girik		Ha
3. Bangunan / Gudang *		
1). Sertifikat Bangunan / Gedung		Buah
2). Tanah Bersertifikat		Ha
4. Bangunan / Gudang Bersertifikat *		
1). Hak Milik *		
1. Jumlah		Bidang
2. Luas		Ha
2). Hak Guna Bangunan *		
1. Jumlah		Bidang
2. Luas		Ha
3). Hak Pakai *		
1. Jumlah		Bidang
2. Luas		Ha
5. Tanah Pertanian / Perkebunan / Ladang Bersertifikat *		
1). Hak Milik *		
1. Jumlah		Bidang
2. Luas		Ha
2). Hak Penggunaan Lahan *		
1. Jumlah		Bidang
2. Luas		Ha
3). Hak Pakai *		
1. Jumlah		Bidang
2. Luas		Ha
VI. Sarana pengendalian Lingkungan Hidup *		
1. Laboratorium penelitian lingkungan		Unit
2. Pusat Evakuasi Bencana		Unit
3. Sarana monitoring polusi udara		Unit
VII. Sampah *		
1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah	66	Unit
2. Kapasitas Daya Tampung TPS	396	Ton
3. Tempat Pengolahan Akhir (TPA)	1	Unit
4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	6	Unit
5. Volume Produksi Sampah		Ton
6. Volume Sampah Yang Ditangani	210	Ton
VIII. Air Limbah *		
1. Sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat	2	Unit
2. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga/setempat		Unit

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Perumahan dan

Permukiman

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Perumahan *		
1. Perumnas	2.007	Unit
2. Status Kepemilikan Rumah *		
1). Rumah Milik Sendiri	2.007	Unit
2). Rumah Sewa		Unit
3. Penyediaan Perumahan *		
4. KPR/BTN		Unit
5. Real Estate		Unit
6. Kekurangan Rumah *		
7. Rumah Susun		Unit
8. Perorangan		Unit
9. Kebutuhan Rumah	2.007	Unit
10. Penyediaan Jaringan/Instalasi *		
1). Jumlah Jaringan/Instalasi PLN		Unit
2). Jumlah Jaringan/Instalasi PDAM		Unit
11. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Fisik Bangunan **		Unit
1). Jumlah Rumah Bangunan Permanen		Unit
2). Jumlah Rumah Semi Permanen		Unit
3). Jumlah Rumah Non Permanen		Unit
II. Jumlah Rumah **		Unit
1. Layak Huni **		Unit
1). Pedesaan		Unit
2). Perkotaan		Unit
2. Tidak Layak Huni **		Unit
1). Pedesaan		Unit
2). Perkotaan		Unit
III. Luas Rumah per Kapita **		m2
1. Layak Huni **		m2
1). Pedesaan		m2
2). Perkotaan		m2
2. Tidak Layak Huni **		m2
1). Pedesaan		m2
2). Perkotaan		m2
IV. Luas Areal Pemukiman **		m2
1. Layak Huni **	1.946.130.000	m2
1). Pedesaan		m2
2). Perkotaan	1.946.130.000	m2
2. Tidak Layak Huni **		m2
1). Pedesaan		m2
2). Perkotaan		m2
V. Jumlah Bangunan **	2.503	Unit
1. Ber IMB	2.503	Unit

Nama	Nilai	Satuan
2. Non IMB		Unit
VI. Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis *		
1. Tingkat Kekumuhan Pemukiman *		
1). Luas Areal Pemukiman Kumuh		Ha
2). Jumlah Penduduk yang Tinggal di Pemukiman Kumuh		Jiwa
3). Jumlah Keluarga yang Tinggal di Pemukiman Kumuh		KK
2. Pemukiman Lahan Kritis *		
1). Jumlah Keluarga yang Tinggal di Lahan Kritis		KK
VII. Pemukiman Ilegal *		
1. Pemukiman Ilegal Di atas Tanah Milik Negara *		
1). Luas Areal		Ha
2). Jumlah Penduduk		Jiwa
3). Jumlah Keluarga		KK
2. Pemukiman Ilegal Di atas Kawasan Hijau *		
1). Luas Areal		Ha
2). Jumlah Penduduk		Jiwa
3). Jumlah Keluarga		KK
3. Pemukiman Ilegal Di atas Tanah Perorangan *		
1). Luas Areal		Ha
2). Jumlah Penduduk		Jiwa
3). Jumlah Keluarga		KK
VIII. Pemukiman di Bantaran Sungai *		
1. Luas Areal		Ha
2. Jumlah Penduduk		Jiwa
3. Jumlah Keluarga		KK
IX. Pemukiman di bawah SUTET *		
1. Luas Areal		Ha
2. Jumlah Penduduk		Jiwa
3. Jumlah Keluarga		KK
X. Jumlah Ruang Publik **		Unit
1. Balai Pertemuan		Unit
2. Gedung Kesenian		Unit
3. Gelanggang Olahraga		Unit
4. Stadion		Unit
5. Tempat rekreasi		Unit
XI. Jumlah Ruang Publik yang Berubah Fungsi		Ha
XII. Rumah Tinggal Berakses Sanitasi **		Unit
1. Memiliki Fasilitas Air bersih		Unit
2. Memiliki Pembuangan Tinja		Unit
3. Memiliki Pembuangan air limbah (Air Bekas)		Unit
4. Memiliki Pembuangan sampah		Unit

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pekerjaan Umum

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas *		
1. Jalan Nasional	243.066	Km
2. Jalan Propinsi	162,77	Km
3. Jalan Kabupaten/Kota	413,51	Km
4. Jalan Desa/Lokal		Km
5. Jalan Tol		Km
1). Panjang Jalan Tol Per Ruas		Km
2). Panjang Jalan Tol Per Operator		Km
II. Kondisi Jalan *		
1. Aspal	794,13	Km
2. Berbatu	0,646	Km
3. Hotmix (Aspal Beton)		Km
4. Cor Beton		Km
5. Kerikil	17,6	Km
6. Tanah	6,97	Km
III. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi *		
1. Jalan Baik	660.653	Km
2. Jalan Rusak Ringan	77.566	Km
3. Jalan Rusak Berat	18.072	Km
IV. Jalan Penghubung *		
1. Jalan Penghubung Dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Min. Dilalui Roda 4)		Km
2. Jalan Setapak		Km
V. Jembatan *		
1. Panjang	1,96	Km
2. Jumlah	29	Buah
VI. Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi *		
1. Arteri	219.901	Km
2. Kolektor	248,41	Km
3. Jalan Lokal	297	Km
4. Jalan Lingkungan	54,03	Km
VII. Tempat Pemakaman **	996.823	M2
1. Luas Tempat Pemakaman Umum	957.828	M2
2. Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum	38.995	M2
3. Luas Tempat Pemakaman Khusus	0	M2
4. Luas Taman Makam Pahlawan		M2
VIII. Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan *		
1. Non Teknis		Meter
2. Teknis **		Meter
1). Primer		Meter
2). Sekunder		Meter
3). Tersier		Meter
3. Luas Irigasi		M2

Nama	Nilai	Satuan
4. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik		M2
5. Luas Sawah Non Irigasi		M2
IX. Panjang jalan yang memiliki:		Km
1. Trotoar	156,5	Km
2. Drainase/Saluran Pembuangan Air	332,56	Km
3. Sempadan Jalan		Km
4. Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Liima atau Bangunan Rumah Liar		Km
X. Sempadan Sungai *		
1. Panjang Sempadan Sungai	322.403	Km
2. Panjang Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		Km
XI. Drainase *		
1. Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air		Km
2. Panjang Drainase Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar		Km
3. Jaringan sistem Drainase		Unit
XII. Turap *		
1. Jumlah Lokasi Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor		Km
2. Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Longsor		Km
XIII. Luas area permukiman tertata		M2
XIV. Sumber Air Minum *		
1. Air Hujan		Unit
2. Mata Air	3	Unit
3. PAM/Air Dalam Kemasan	2	Unit
4. Pompa Listrik/Tangan		Unit
5. Sumur	2	Unit
6. Sungai/Danau	21	Unit
7. Lainnya	17	Unit
XV. Status Mutu Air *		
1. Pemukiman *		
1). Permukiman Yang Menggunakan Sumber Mata Air		Unit
2). Permukiman Yang Sumber Mata Air nya Dipantau Mutunya		Unit
2. Industri *		
1). Industri Yang Menggunakan Sumber Mata Air		Unit
2). Industri Yang Sumber Mata Air nya Dipantau Mutunya		Unit
XVI. Daya Tampung Tempat Pemakaman		Unit
1. Pemakaman Umum		Unit
2. Pemakaman Bukan Umum		Unit
3. Pemakaman Khusus		Unit
4. Taman Makam Pahlawan		Unit

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pariwisata, POS,

Telekomunikasi dan

Informatika

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pariwisata *		
1. Jumlah Obyek Wisata *		
1). Alam	10	Buah
2). Buatan	27	Buah
2. Jumlah Hotel *		
1). Hotel Bintang Lima	10	Buah
2). Hotel Bintang Empat	8	Buah
3). Hotel Bintang Tiga	13	Buah
4). Hotel Bintang Dua	3	Buah
5). Hotel Bintang Satu	2	Buah
6). Hotel Non Bintang		Buah
3. Jenis Objek Wisata *		
1). Wisata Marina *		
1. Total Objek Wisata	18	Buah
2. Total Wisatawan Domestik		Jiwa
3. Total Wisatawan Mancanegara		Jiwa
2). Wisata Tirta *		
1. Total Objek Wisata	5	Buah
2. Total Wisatawan Domestik		Jiwa
3. Total Wisatawan Mancanegara		Jiwa
3). Wisata Sejarah *		
1. Total Objek Wisata	6	Buah
2. Total Wisatawan Domestik		Jiwa
3. Total Wisatawan Mancanegara		Jiwa
4). Suaka Alam *		
1. Total Objek Wisata	11	Buah
2. Total Wisatawan Domestik		Jiwa
3. Total Wisatawan Mancanegara		Jiwa
5). Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan		%
6). Persentase Penduduk yg Melakukan Perjalanan Wisata		%
4. Jumlah Wisatawan *		
1). Asing (Mancanegara)	312.979	Jiwa
2). Domestik (Nasional)	180.516	Jiwa
3). Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan	493.495	Orang
5. Jumlah dan Tingkat Hunian Kamar Penginapan Hotel *		
1). Jumlah Kamar Penginapan Hotel/Penginapan	1.983	Unit
2). Jumlah Rata-rata Penggunaan Kamar Hotel/Penginapan	3	Hari
3). Jumlah Kamar Hotel/Penginapan yang Terisi	1.983	Unit
4). Jumlah dan Tingkat Hunian Kamar Penginapan Hotel		Buah
6. Tempat Hiburan/Rekreasi *		
1). Gedung Bioskop	1	Unit

Nama	Nilai	Satuan
2). Lainnya	4	Unit
II. Pos dan Telekomunikasi *		
1. Kantor Pos	6	Unit
2. Penyedia Jaringan Internet (ISP)	3	ISP
3. Telekomunikasi *		
1). Kapasitas Sentral		SST
2). Kapasitas Terpasang		SST
3). Kapasitas Terpakai		SST
4). Pelanggan		SST
5). Telepon Umum (Koin)		SST
6). Wartel		Unit
7). Warnet		SST
8). Jumlah Rumah Tangga Yang Berlangganan Telepon	228	RT
9). Jumlah Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	116.951	Orang
10). Jumlah Jaringan Telepon Genggam	6	Unit
11). Jaringan telepon		Unit
12). Stasiun Radio	2	Unit
13). Stasiun Relay	1	Unit
III. Jenis Surat Kabar Yang Masuk ke Daerah *		
1. Lokal	5	Buah
2. Nasional	2	Buah
IV. Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Daerah *		
1. TV **	8	Channel
1). TV Lokal	3	Channel
2). TV Internasional	5	Channel
2. Radio **	10	Channel
1). Radio Lokal	5	Channel
2). Radio Internasional	5	Channel
V. Jumlah Sistem Informasi Pemda **	28	Unit
1. Sistem Informasi Manajemen Pemda	2	Unit
2. Website Daerah	26	Unit

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Perhubungan dan

Transportasi

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Perhubungan *		
1. Transportasi Darat *		
1). Angkutan Darat *		
1. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	140.000	Ton
2. Jumlah Angkutan Darat	140	Unit
2). Terminal Penumpang *		
1. Kelas A		Unit
2. Kelas B	1	Unit
3. Kelas C		Unit
4. Jumlah Orang Melalui Terminal	3.500	Orang
5. Jumlah Barang Melalui Terminal		Ton
6. Terminal Darat **	1	Buah
1). Terminal Barang		Unit
2). Terminal Penumpang	1	Unit
3). Angkutan Penyeberangan *		
1. Dermaga	71	Unit
2. Komersil	5	Unit
3. Perintis	3	Unit
4. Kapal Ferry	5	Unit
5. Kendaraan Roda Empat		Unit
6. Jumlah Orang Melalui Dermaga		Orang
7. Jumlah Barang Melalui Dermaga		Ton
4). Jumlah Jembatan Timbang		Buah
5). Angkutan Kereta Api *		
1. Jumlah Stasiun Kereta Api		Stasiun
6). Jumlah pemasangan rambu-rambu	1.107	Unit
7). Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	1.500	Unit
2. Transportasi Laut *		
1). Jumlah Pelabuhan	14	Unit
2). Pelabuhan Yang Diusahakan *		
1. Peti Kemas	1	Unit
2. Semi Peti Kemas		Unit
3. Non Peti Kemas	4	Unit
3). Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan *		
1. Pendaratan Ikan		Unit
2. Kapal	4	Unit
3. Penumpang	4	Unit
4. Pelni	1	Unit
5. Jumlah	9	Unit
6. Kapasitas		Unit
7. Swasta		Unit
8. Jumlah		Orang

Nama	Nilai	Satuan
3. Transportasi Udara *		
1). Jumlah Bandara *		
1. Internasional		Buah
2. lokal		Buah
3. Jumlah Orang yang Melalui Bandara		Orang
4. Jumlah Barang yang Melalui Bandara		Ton
2). Jumlah Maskapai		Unit
4. Jumlah Penumpang Angkutan **	3.500	Orang
1). Jumlah Penumpang Bis	3.500	Orang
2). Jumlah Penumpang Kereta Api		Orang
3). Jumlah Penumpang Kapal Laut		Orang
4). Jumlah Penumpang Pesawat Udara		Orang
II. Angkutan Umum *		
1. Jumlah Angkutan Umum **	1.498	Unit
1). Mobil Penumpang Umum	26	Unit
2). Mobil Bus	165	Unit
3). Mobil Barang	1.307	Unit
4). Kereta Gandengan		Unit
5). Kereta Tempelan		Unit
2. Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan **	2	Unit
1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi		Unit
2). Izin Trayek Perkotaan		Unit
3). Izin Trayek Pedesaan	2	Unit
3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum **	1.641	Unit
1). Mobil Penumpang Umum	26	Unit
2). Mobil Bus	178	Unit
3). Mobil Barang	1.437	Unit
4). Kereta Gandengan		Unit
5). Kereta Tempelan		Unit
4. Lama Pengujian KIR **	225	Hari
1). Mobil Penumpang Umum	45	Hari
2). Mobil Bus	45	Hari
3). Mobil Barang	45	Hari
4). Kereta Gandengan	45	Hari
5). Kereta Tempelan	45	Hari
5. Biaya Pengujian KIR **	318.000	Rp
1). Mobil Penumpang Umum	55.000	Rp
2). Mobil Bus	62.000	Rp
3). Mobil Barang	67.000	Rp
4). Kereta Gandengan	67.000	Rp
5). Kereta Tempelan	67.000	Rp
III. Pelayanan Transportasi *		
1. Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll)		Unit
2. Fasilitas Perlengkapan Jalan (halte, trotoar) **	44	Unit
1). Trotoar		Unit
2). Jalur Sepeda		Unit
3). Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki	16	Unit
4). Halte	28	Unit

Nama	Nilai	Satuan
5). Fasilitas Khusus Penyandang Cacat		Unit
3. Jaringan Jalan dan Perambuan		Unit
4. Jaringan Pelayanan Angkutan	230	Unit
5. Manajemen Rekayasa	5	Unit
6. Pelayanan Angkutan		Unit
7. Penerangan Jalan Lingkungan		Unit
IV. Jumlah Kendaraan Bermotor **	32.888	Unit
1. Mobil Penumpang		Unit
2. Bus	165	Unit
3. Truk	706	Unit
4. Sepeda Motor	32.017	Unit

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan
Industri, Perdagangan,
Pengembangan Usaha
Nasional, Lembaga
Keuangan dan Koperasi
2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Industri *		
1. Industri Kecil *		
1). Unit Kerja	944	Unit
2). Tenaga Kerja	2.100	Orang
3). Nilai Produksi	2.500	Rp Juta
4). Jumlah Industri Kecil per Jenis Kerajinan *		
1. Kulit		Unit
2. Kayu		Unit
3. Logam/Logam Mulia		Unit
4. Anyaman/Gerabah/Keramik	1	Unit
5. Dari Kain Tenun	1	Unit
6. Industri Makanan/Minuman		Unit
7. Rambut		Unit
8. Tekstil		Unit
9. Pakaian jadi		Unit
10. Kertas		Unit
11. Penerbitan, Percetakan, dan reproduksi media rekaman		Unit
12. Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilang		Unit
13. Kimia		Unit
14. Karet		Unit
15. Daur ulang	4	Unit
16. Rokok		Unit
2. Industri Mikro *		
1). Unit Kerja	38	Unit
2). Tenaga Kerja	6.620	Orang
3). Nilai Produksi	263,1	Rp Juta
4). Jumlah Industri Mikro		Unit
3. Industri Menengah *		
1). Unit Kerja	30	Unit
2). Tenaga Kerja	6.325	Orang
3). Nilai Produksi	224,1	RP Juta
4). Jumlah Industri Menengah		Unit
4. Industri Besar *		
1). Unit Kerja	47	Unit
2). Tenaga Kerja	9.250	Orang
3). Nilai Produksi	302,1	Rp Juta
5. Industri Rumah Tangga *		

Nama	Nilai	Satuan
1). Jumlah Unit Usaha	866	Unit
2). Jumlah Tenaga Kerja	1.735	Orang
6. Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib Amdal		Unit
7. Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi		Unit
II. Perdagangan *		
1. Sarana Perdagangan *		
1). Pasar Tradisional	9	Buah
2). Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	13	Buah
3). Hipermarket		Buah
4). Pasar Grosir		Buah
5). Mal/Plaza	1	Buah
6). Pertokoan/Warung/Kios	227	Buah
2. Restoran dan Rumah Makan *		
1). Restoran		Unit
1. Jumlah Jenis Restoran *		
1). Jenis Tertinggi	12	Unit
2). Jenis Menengah	12	Unit
3). Jenis Terendah		Unit
2. Jumlah Kelas Restoran *		
1). Kelas A		Unit
2). Kelas B		Unit
3). Kelas C		Unit
4). Kelas D		Unit
2). Rumah Makan		Unit
1. Jumlah Jenis Rumah Makan *		
1). Jenis Tertinggi		Unit
2). Jenis Menengah		Unit
3). Jenis Terendah		Unit
2. Jumlah Kelas Rumah Makan *		
1). Kelas A		Unit
2). Kelas B		Unit
3). Kelas C		Unit
4). Kelas D		Unit
3. Jenis Bangunan Pasar *		
1). Pasar Bangunan Permanen/Semi Permanen	9	Buah
2). Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen		Buah
3). Pusat Perdagangan		Unit
4. Rumah Potong Hewan dan Unggas		Unit
III. Pengembangan Usaha Nasional *		
1. Koperasi *		
1). Jumlah Koperasi Aktif	171	Buah
2). Jumlah Koperasi Tidak Aktif	53	Buah
3). Jumlah Induk Koperasi	0	Buah
4). Jumlah Koperasi Primer	224	Buah
5). Jumlah KUD	8	Buah
6). Jumlah Non KUD	216	Buah
2. Jumlah Pengusaha *		

Nama	Nilai	Satuan
1). Pengusaha Kecil	2.349	Orang
2). Pengusaha Menengah	189	Orang
3). Pengusaha Besar		Orang
IV. Nilai Ekspor Total		Rp Juta
V. Nilai Impor Total		Rp Juta
VI. Nilai Ekspor dan Impor Non Migas *		
1. Ekspor		Rp Juta
2. Impor		Rp Juta
VII. Jumlah Industri/Perusahaan yang Menerapkan K3		Unit
VIII. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal		Kelompok
IX. Input Output Industri *		
1. Input Bahan **		Rp Juta
1). Total Input Impor		Rp Juta
2). Total Input Domestik Selain Lokal		Rp Juta
3). Total Input Lokal		Rp Juta
2. Total Output		Rp Juta
3. Nilai Tambah *		
1). Total Nilai Tambah		Rp Juta
2). Total Tenaga Kerja		Rp Juta
3). Total Subsidi		Rp Juta
4). Total Pajak Tak Langsung		Rp Juta
4. Nilai Tambah Produktivitas Sektor *		
1). Pertanian		Rp Juta
2). Pertambangan & Penggalan		Rp Juta
3). Industri & Pengelolaan		Rp Juta
4). Listrik, Gas & Air Bersih		Rp Juta
5). Konstruksi		Rp Juta
6). Perdagangan, Hotel & Restoran		Rp Juta
7). Pengangkutan & Transportasi		Rp Juta
8). Jasa-jasa		Rp Juta
5. Total Permintaan Akhir		Rp Juta
X. Lembaga Perijinan *		
1. PTSP		Unit
2. PTSP yang Menerapkan SPIPISE		Unit
3. Pengurusan Perijinan *		
1). Lama Pengurusan Perijinan *		
1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan		Hari
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan		Hari
3. IUI : Izin Usaha Industri		Hari
4. TDI : Tanda Daftar Industri		Hari
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan		Hari
6. HO : Izin Gangguan		Hari
2). Jumlah Persyaratan Dokument Perijinan *		
1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan		Dokumen
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan		Dokumen
3. IUI : Izin Usaha Industri		Dokumen
4. TDI : Tanda Daftar Industri		Dokumen

Nama	Nilai	Satuan
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan		Dokumen
6. HO : Izin Gangguan		Dokumen
3). Biaya Resmi Perijinan *		
1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan		Rp
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan		Rp
3. IUI : Izin Usaha Industri		Rp
4. TDI : Tanda Daftar Industri		Rp
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan		Rp
6. HO : Izin Gangguan		Rp
XI. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang Mendapatkan Bantuan Binaan dari Pemda		Kelompok
XII. Jumlah Kelompok Pengrajin		Kelompok
XIII. Jumlah Kelompok Pengrajin yang Mendapatkan Bantuan dari Pemda		Kelompok
XIV. Indeks yang Diterima Petani		Kelompok
XV. Indeks yang Dibayar Petani		Kelompok
XVI. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut SubSektor **		Perusahaan
1. Makanan dan minuman		Perusahaan
2. Tembakau		Perusahaan
3. Tekstil		Perusahaan
4. Pakaian jadi		Perusahaan
5. Kulit dan barang dari kulit		Perusahaan
6. Kayu, barang dari kayu, dan anyaman		Perusahaan
7. Kertas dan barang dari kertas		Perusahaan
8. Penerbitan, percetakan, dan reproduksi		Perusahaan
9. Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar nuklir		Perusahaan
10. Kimia dan barang-barang dari bahan kimia		Perusahaan
11. Karet dan barang-barang dari plastik		Perusahaan
12. Barang galian bukan logam		Perusahaan
13. Logam dasar		Perusahaan
14. Barang-barang dari logam dan peralatannya		Perusahaan
15. Mesin dan perlengkapannya		Perusahaan
16. Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data		Perusahaan
17. Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya		Perusahaan
18. Radio, televisi, dan peralatan komunikasi		Perusahaan
19. Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam		Perusahaan
20. Kendaraan bermotor		Perusahaan
21. Alat angkutan lainnya		Perusahaan
22. Furniture dan industri pengolahan lainnya		Perusahaan
23. Daur ulang		Perusahaan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan
BUMD, Perbankan Daerah
dan Lembaga Keuangan
Daerah
2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Proyek PMA		buah
1. Realisasi Investasi PMA per Sektor *		
1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan		Rp Juta
2). Pertambangan dan Penggalian		Rp Juta
3). Industri Pengolahan (migas dan non migas)		Rp Juta
4). Listrik, Gas dan Air Bersih		Rp Juta
5). Bangunan		Rp Juta
6). Perdagangan, Hotel dan Restoran		Rp Juta
7). Pengangkutan dan Komunikasi		Rp Juta
8). Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan		Rp Juta
9). Jasa-Jasa		Rp Juta
II. Jumlah Proyek PMDN **		buah
1. Realisasi Investasi PMDN per Sektor *		
1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan		Rp Juta
2). Pertambangan dan Penggalian		Rp Juta
3). Industri Pengolahan (migas dan non migas)		Rp Juta
4). Listrik, Gas dan Air Bersih		Rp Juta
5). Bangunan		Rp Juta
6). Perdagangan, Hotel dan Restoran		Rp Juta
7). Pengangkutan dan Komunikasi		Rp Juta
8). Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan		Rp Juta
9). Jasa-Jasa		Rp Juta
2. Investasi *		
1). Total Investasi Pemerintah Pusat		Rp Juta
2). Total Investasi Pemerintah Daerah		Rp Juta
3). Total Investasi Swasta		Rp Juta
III. Jumlah BPR **		Buah
1. Konvensional		Buah
2. Syariah		Buah
IV. Jumlah Bank Umum **		Buah
1. Konvensional		Buah
2. Syariah		Buah
V. Perusahaan Asuransi Kerugian **		Buah
1. Konvensional		Buah
2. Syariah		Buah
VI. Perusahaan Asuransi Jiwa **		Buah
1. Syariah		Buah
2. Konvensional		Buah
VII. Jumlah PDAM		Buah
VIII. Jumlah Investor Berskala Nasional *		
1. PMA *		

Nama	Nilai	Satuan
1). BUMN Asing		Unit
2). Swasta Asing		Unit
2. PMDN *		
1). BUMD		Unit
2). BUMN		Unit
3). Swasta		Unit
4). Campuran		Unit
IX. Jasa keuangan *		
1. Lembaga Keuangan Non Bank **		Unit
1). Modal Ventura		Unit
2). Lembaga Keuangan Mikro		Unit
3). Perusahaan Asuransi		Unit
4). Cabang Perusahaan Asuransi		Unit
2. Lembaga Keuangan Bank **		Unit
1). Milik Pemerintah		Unit
2). Swasta Nasional		Unit
3). Swasta Asing		Unit
4). Milik Pemerintah Daerah		Unit
5). Milik Pemerintah Asing		Unit
6). Milik Campuran		Unit
7). Jumlah Cabang Milik Pemerintah		Unit
8). Jumlah Cabang Milik Swasta Nasional		Unit
9). Jumlah Cabang Milik Swasta Asing		Unit
10). Jumlah Cabang Milik Pemerintah Daerah		Unit
11). Jumlah Cabang Milik Pemerintah Asing		Unit
12). Jumlah Cabang Milik Campuran		Unit
X. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM **		Unit
1. Jumlah seluruh UKM		Unit
2. Jumlah BPR/LKM		Unit
3. Jumlah UKM non BPR/LKM	2	Unit
XI. Lembaga Keuangan Perbankan *		
1. Lembaga Non Perbankan		Unit
2. Jumlah Perbankan		Unit

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pengelolaan ASET atau

Barang Daerah

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Aset Daerah *		
1. Aset Bergerak	25.478	Unit
2. Aset Tidak Bergerak	154.466	Unit
II. Nilai Aset/Barang Daerah *		
1. Aset Bergerak	291.207.959.221	Rp Juta
2. Aset Tidak Bergerak	.438.307.192.306	Rp Juta
III. Nilai Penyusutan *		
1. Aset Bergerak	178.104.919.148	Rp Juta
2. Aset Tidak Bergerak	748.298.132.751	Rp Juta

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Ekspor Produk Domestik

Regional Bruto

2015

Nama	Nilai	Satuan
XI. PDRB atas Harga Dasar Berlaku Tahun 2010 *		Rp Juta
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan **		Rp Juta
1). Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian **		Rp Juta
1. Tanaman Pangan		Rp Juta
2. Tanaman Hortikultura Semusim		Rp Juta
3. Perkebunan Semusim		Rp Juta
4. Tanaman Hortikultura tahunan dan lainnya		Rp Juta
5. Perkebunan Tahunan		Rp Juta
6. Peternakan		Rp Juta
7. Jasa Pertanian dan Perburuan		Rp Juta
2). Kehutanan dan Penebangan Kayu		Rp Juta
3). Perikanan		Rp Juta
2. Pertambangan dan Penggalian **		Rp Juta
1). Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi		Rp Juta
2). Pertambangan Batu Bara dan Lignit		Rp Juta
3). Pertambangan Bijih Logam		Rp Juta
4). Pertambangan dan penggalian lainnya		Rp Juta
3. Industri Pengolahan **		Rp Juta
1). Industri Batu Bara dan pengilangan Migas		Rp Juta
1. Industri Batu Bara		Rp Juta
2. Industri Pengilangan Migas		Rp Juta
2). Industri Makanan dan Minuman		Rp Juta
3). Pengolahan Tembakau		Rp Juta
4). Industri tekstil dan Pakaian Jadi		Rp Juta
5). Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki		Rp Juta
6). Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya		Rp Juta
7). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman		Rp Juta
8). Industri Kimia, Farmasi dan obat tradisional		Rp Juta
9). Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik		Rp Juta
10). Industri barang galian bukan logam		Rp Juta
11). Industri Logam dasar		Rp Juta
12). Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik		Rp Juta
13). Industri mesin dan perlengkapan YTDL		Rp Juta
14). Industri alat angkutan		Rp Juta
15). Industri furnitur		Rp Juta
16). industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan		Rp Juta
4. Pengadaan Listrik dan Gas		Rp Juta
1). Ketenagalistrikan		Rp Juta

Nama	Nilai	Satuan
2). Pengadaan gas dan Produksi Es		Rp Juta
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		Rp Juta
6. Konstruksi		Rp Juta
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		Rp Juta
1). Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya		Rp Juta
2). Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor		Rp Juta
8. Transportasi dan Pergudangan		Rp Juta
1). Angkutan Rel		Rp Juta
2). Angkutan darat		Rp Juta
3). Angkutan laut		Rp Juta
4). Angkutan sungai danau dan penyebrangan		Rp Juta
5). Angkutan Udara		Rp Juta
6). Pergudangan dan jasa penumpang angkutan, pos dan kurir		Rp Juta
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Rp Juta
1). Penyediaan Akomodasi		Rp Juta
2). Penyediaan Makan Minum		Rp Juta
10. Informasi dan Komunikasi		Rp Juta
11. Jasa Keuangan dan Asuransi		Rp Juta
1). Jasa Perantara Keuangan		Rp Juta
2). Asuransi dan dana pensiun		Rp Juta
3). Jasa Keuangan Lainnya		Rp Juta
4). Jasa penunjang Keuangan		Rp Juta
12. Real Estate		Rp Juta
13. Jasa Perusahaan		Rp Juta
14. Administrasi dan Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		Rp Juta
15. Jasa Pendidikan		Rp Juta
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		Rp Juta
17. Jasa Lainnya		Rp Juta
XI. PDRB atas Harga Konstan Tahun 2010 *		Rp Juta
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan **		Rp Juta
1). Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian **		Rp Juta
1. Tanaman Pangan		Rp Juta
2. Tanaman Hortikultura Semusim		Rp Juta
3. Perkebunan Semusim		Rp Juta
4. Tanaman Hortikultura tahunan dan lainnya		Rp Juta
5. Perkebunan Tahunan		Rp Juta
6. Peternakan		Rp Juta
7. Jasa Pertanian dan Perburuan		Rp Juta
2). Kehutanan dan Penebangan Kayu		Rp Juta
3). Perikanan		Rp Juta
2. Pertambangan dan Penggalan **		Rp Juta
1). Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi		Rp Juta
2). Pertambangan Batu Bara dan Lignit		Rp Juta
3). Pertambangan Bijih Logam		Rp Juta

Nama	Nilai	Satuan
4). Pertambangan dan penggalan lainnya		Rp Juta
3. Industri Pengolahan **		Rp Juta
1). Industri Batu Bara dan pengilangan Migas		Rp Juta
1. Industri Batu Bara		Rp Juta
2. Industri Pengilangan Migas		Rp Juta
2). Industri Makanan dan Minuman		Rp Juta
3). Pengolahan Tembakau		Rp Juta
4). Industri tekstil dan Pakaian Jadi		Rp Juta
5). Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki		Rp Juta
6). Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya		Rp Juta
7). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman		Rp Juta
8). Industri Kimia, Farmasi dan obat tradisional		Rp Juta
9). Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik		Rp Juta
10). Industri barang galian bukan logam		Rp Juta
11). Industri Logam dasar		Rp Juta
12). Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik		Rp Juta
13). Industri mesin dan perlengkapan YTDL		Rp Juta
14). Industri alat angkutan		Rp Juta
15). Industri furnitur		Rp Juta
16). industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan		Rp Juta
4. Pengadaan Listrik dan Gas		Rp Juta
1). Ketenagalistrikan		Rp Juta
2). Pengadaan gas dan Produksi Es		Rp Juta
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		Rp Juta
6. Konstruksi		Rp Juta
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		Rp Juta
1). Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya		Rp Juta
2). Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor		Rp Juta
8. Transportasi dan Pergudangan		Rp Juta
1). Angkutan Rel		Rp Juta
2). Angkutan darat		Rp Juta
3). Angkutan laut		Rp Juta
4). Angkutan sungai danau dan penyebrangan		Rp Juta
5). Angkutan Udara		Rp Juta
6). Pergudangan dan jasa penumpang angkutan, pos dan kurir		Rp Juta
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Rp Juta
1). Penyediaan Akomodasi		Rp Juta
2). Penyediaan Makan Minum		Rp Juta
10. Informasi dan Komunikasi		Rp Juta
11. Jasa Keuangan dan Asuransi		Rp Juta
1). Jasa Perantara Keuangan		Rp Juta

Nama	Nilai	Satuan
2). Asuransi dan dana pensiun		Rp Juta
3). Jasa Keuangan Lainnya		Rp Juta
4). Jasa penunjang Keuangan		Rp Juta
12. Real Estate		Rp Juta
13. Jasa Perusahaan		Rp Juta
14. Administrasi dan Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		Rp Juta
15. Jasa Pendidikan		Rp Juta
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		Rp Juta
17. Jasa Lainnya		Rp Juta

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Ringkasan APBD

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pendapatan Daerah *		
1. Pendapatan asli daerah **	26.637.910.856.081	
1). Pajak Daerah		Rupiah
2). Retribusi Daerah	9.083.349.543	Rupiah
3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.411.204.438	Rupiah
4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	26.615.416.302.100	Rupiah
5). Pelampauan Penerimaan PAD		Rupiah
6). Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah		Rupiah
2. Dana perimbangan **	497.680.184.131	
1). Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	142.922.557.131	Rupiah
2). Dana Alokasi Umum	290.035.577.000	Rupiah
3). Dana Alokasi Khusus	64.722.050.000	Rupiah
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah **	194.911.732.761	
1). Hibah		Rupiah
2). Dana Darurat		Rupiah
3). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	45.281.828.656	
4). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.536.973.000	
5). Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.637.064.725	Rupiah
6). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	97.455.866.380	Rupiah
II. Belanja Daerah *		
1. Belanja Tidak Langsung *		
1). Belanja tidak langsung pegawai		
2). Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur **	357.407.076.160	Rupiah
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	237.406.872.126	Rupiah
2. Belanja Tambahan Penghasilan	111.980.364.244	Rupiah
3. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH	1.755.800.000	Rupiah
4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah	6.264.039.790	Rupiah
3). Belanja bunga		Rupiah
4). Belanja subsidi	425.208.862	Rupiah
5). Belanja hibah	24.375.645.680	Rupiah
6). Belanja bantuan sosial	35.264.046.373	Rupiah
7). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		Rupiah
8). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	35.264.046.373	Rupiah
9). Belanja Tidak Terduga	17.562.184	Rupiah
10). Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daerah	47,45	%
11). Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung	1	%

Nama	Nilai	Satuan
2. Belanja Langsung *		
1). Belanja langsung pegawai		
2). Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur **	15.129.106.937.713	Rupiah
1. Belanja Honorarium PNS	15.063.379.800.220	Rupiah
2. Belanja Uang Lembur	414.747.000	Rupiah
3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	418.000.000	Rupiah
4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.222.810.000	Rupiah
5. Belanja Premis Asuransi Kesehatan	841.171.350	Rupiah
6. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	17.358.182.920	Rupiah
7. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	166.826.000	Rupiah
8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.000.717.960	Rupiah
9. Belanja Perjalanan Dinas	43.304.682.263	Rupiah
10. Belanja Perjalanan Pindah Tugas		Rupiah
11. Belanja Pemulangan Pegawai		Rupiah
12. Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleir, Peralatan dan Perlengkapan lain		Rupiah
3). Belanja barang dan jasa	223.384.009.913	
4). Belanja modal	162.394.712.198	
5). Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya		Rupiah
III. Pembiayaan Daerah *		
1. Penerimaan pembiayaan **	121.765.858.004.040	
1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	121.765.858.004.040	Rupiah
2). Pencairan dana cadangan		Rupiah
3). Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		Rupiah
4). Penerimaan pinjaman daerah		Rupiah
5). Penerimaan kembali pemberian pinjaman		Rupiah
6). Penerimaan piutang daerah		Rupiah
2. Pengeluaran pembiayaan **	0	
1). Pembentukan dana cadangan		Rupiah
2). Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah	0	Rupiah
3). Pembayaran pokok utang		Rupiah
4). Pemberian pinjaman daerah		Rupiah
5). Pembayaran Kegiatan Lanjutan		Rupiah
6). Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		Rupiah
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		Rupiah
IV. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan		Rp Juta
V. Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota *		
1. Pagu		Rp Juta
2. Realisasi		Rp Juta
VI. Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa *		
1. Pagu		Rp Juta
2. Realisasi		Rp Juta
VII. Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota		Rp Juta
VIII. Jumlah Alokasi APBD Propinsi ke Desa		Rp Juta

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Dana Perimbangan

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Dana Perimbangan	497.680.184.131	Rp Juta
1. Jumlah Dana Alokasi Khusus *		
1). Pagu	64.720.590.000	Rp Juta
2). Realisasi	64.722.050.000	Rp Juta
2. Jumlah Dana Alokasi Umum *		
1). Pagu	290.035.577.000	Rp Juta
2). Realisasi	290.035.577.000	Rp Juta
3. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak *		
1). Pagu	43.274.041.528	Rp Juta
2). Realisasi	33.269.714.950	Rp Juta
4. Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam *		
1). Pagu	130.623.597.091	Rp Juta
2). Realisasi	109.652.842.181	Rp Juta
5. Jumlah Dana Perimbangan (a+b+c+d) *		
1). Pagu	528.653.805.619	Rp Juta
2). Realisasi	497.680.184.131	Rp Juta

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pinjaman Daerah

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pinjaman Dalam Negeri	-	Rp
II. Pinjaman Luar Negeri *		
1. Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	-	Rp
2. Pinjaman Luar Negeri Swasta	-	Rp
III. Pinjaman Obligasi Daerah	-	Rp

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pajak Daerah

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Pajak Hotel	61.506.795.017,21	Rp Juta
II. Pajak Restoran	27.540.032.453,12	Rp Juta
III. Pajak Hiburan	1.674.518.742,02	Rp Juta
IV. Pajak Reklame	447.105.001	Rp Juta
V. Pajak Penerangan Jalan	13.012.724.942,42	Rp Juta
VI. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.009.326.100	Rp Juta
VII. Pajak Parkir	207.718.667	Rp Juta
VIII. Pajak Air Tanah		Rp Juta
IX. Pajak Sarang Burung Walet	4.020.000	Rp Juta
X. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	20.820.615.982	Rp Juta
XI. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	3.297.413.587	Rp Juta
XII. Jumlah Pajak yang dikeluarkan		Rp Juta
XIII. Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi		Rp Juta

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Retribusi Daerah

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Retribusi Jasa Umum **	1.035.473.000	RP Juta
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	170.153.000	Rp Juta
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	Rp Juta
3. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil	-	Rp Juta
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	Rp Juta
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	95.000.000	Rp Juta
6. Retribusi Pelayanan Pasar	-	Rp Juta
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	106.549.000	Rp Juta
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	Rp Juta
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	4.450.000	Rp Juta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	Rp Juta
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	Rp Juta
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	Rp Juta
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	Rp Juta
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	659.321.000	Rp Juta
II. Retribusi Jasa Usaha **	3.444.219.267	RP Juta
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	185.090.080	Rp Juta
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	Rp Juta
3. Retribusi Tempat Pelelangan	-	Rp Juta
4. Retribusi Terminal	-	Rp Juta
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	Rp Juta
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	-	Rp Juta
7. Retribusi Rumah Potong Hewan	-	Rp Juta
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.259.129.187	Rp Juta
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	Rp Juta
10. Retribusi Penyeberangan di Air	-	Rp Juta
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	Rp Juta
III. Retribusi Perizinan Tertentu *	-	-
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.469.499.876	Rp Juta
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	27.500.000	Rp Juta
3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.160.670.100	Rp Juta
4. Retribusi Izin Trayek	6.150.000	Rp Juta
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	Rp Juta
IV. Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	-	Rp Juta
V. Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	-	Rp Juta

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan
Politik Dalam Negeri dan
Pengawasan
2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Anggota DPRD	25	Orang
II. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin *		
1. Pria	21	Orang
2. Perempuan	4	Orang
III. Jumlah Fraksi DPRD	6	Fraksi
IV. Partai Politik *		
1. Jumlah Parpol Daerah	0	Partai
2. Jumlah Parpol Peserta Pemilu	12	Partai
V. Karakteristik Politik Masyarakat *		
1. Jumlah Pemilih	94.717	Orang
VI. Tingkat Partisipasi Pemilih *		
1. Jumlah Pemilih		Orang
VII. Organisasi Kemasyarakatan *		
1. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	7	Buah
2. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	9	Buah
VIII. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat *		
1. Kelompok Binaan LPM	3	Kelompok
2. Jumlah LPM Berprestasi		Kelompok
IX. Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	3	Program
X. Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	0	Orang
XI. Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat		Program
XII. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *		
1. Jumlah LSM Lokal **	41	Buah
1). LSM Lokal Terdaftar	41	Buah
2). LSM Lokal Tidak Aktif	0	Buah
2. Jumlah LSM Nasional **		Buah
1). LSM Nasional Terdaftar		Buah
2). LSM Nasional Tidak Aktif		Buah
3. Jumlah LSM Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah **		Buah
1). LSM Asing/Internasional Terdaftar		Buah
2). LSM Asing/Internasional Tidak Aktif		Buah
XIII. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	9	Kegiatan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Hukum

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Perkara Hukum *		
1. Jumlah Perkara Dilaporkan : *		
1). Pidana	o	Perkara
2). Perdata	o	Perkara
3). Politik dan HAM	o	Perkara
4). Lalu Lintas	o	Perkara
2. Jumlah Perkara terselesaikan: *		
1). Pidana	o	Perkara
2). Perdata	o	Perkara
3). Politik dan HAM	o	Perkara
4). Lalu Lintas	o	Perkara
5). Perlindungan perempuan dan anak	o	Perkara
3. Jumlah Perkara Tidak terselesaikan: *		
1). Pidana	o	Perkara
2). Perdata	o	Perkara
3). Politik dan HAM	o	Perkara
4). Lalu Lintas	o	Perkara
5). Perlindungan perempuan dan anak	o	Perkara
II. Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan	o	Kasus
III. Jumlah Kasus Tanah yang Terdaftar	o	Kasus
IV. Kelembagaan *		
1. Jumlah Pengadilan Agama	o	Buah
2. Jumlah Pengadilan Negeri	o	Buah
3. Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara	o	Buah
4. Lembaga Pemasyarakatan	o	Buah
5. Kejaksaan Negeri	o	Buah
V. Jumlah Tindak Kriminal *		
1. Jumlah kasus narkoba	o	Kasus
2. Jumlah kasus pembunuhan	o	Kasus
3. Jumlah kasus seksual	o	Kasus
4. Jumlah kasus penganiayaan	o	Kasus
5. Jumlah kasus pencurian	o	Kasus
6. Jumlah kasus penipuan	o	Kasus
7. Jumlah kasus pemalsuan uang	o	Kasus
VI. Jumlah Tindak Kriminal yang Ditangani **	o	Kasus
1. Jumlah kasus narkoba	o	Kasus
2. Jumlah kasus pembunuhan	o	Kasus
3. Jumlah kasus seksual	o	Kasus
4. Jumlah kasus penganiayaan	o	Kasus
5. Jumlah kasus pencurian	o	Kasus
6. Jumlah kasus penipuan	o	Kasus
7. Jumlah kasus pemalsuan uang	o	Kasus

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Keamanan, Ketertiban

Masyarakat

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Keamanan, Ketertiban Masyarakat *		
1. Jumlah Kriminalitas	226	Kasus
2. Kasus Pertikaian Antar Warga *		
1). Antar Etnis		Kasus
2). Antar Wilayah Desa		Kasus
3). Antar Agama		Kasus
4). Antar Simpatisan Parpol		Kasus
5). Antar Pelajar		Kasus
3. Unjuk Rasa *		
1). Bidang Politik		Kasus
2). Bidang Ekonomi		Kasus
3). Bidang lainnya	3	Kasus
4. Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja		Kasus
5. Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Ppemerintah Daerah		Kasus
6. Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda		Kasus
7. Kasus Pemogokan Kerja		Kasus
8. Korban Pertikaian Antar Warga/ Unjuk Rasa *		
1). Korban Meninggal		Jiwa
2). Korban Luka-Luka		Jiwa
9. Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk		Jiwa
10. Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk		Rp
11. Aparat dan Sarana Keamanan *		
1). Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)		Orang
2). Jumlah Aparat Pamong Praja	182	Orang
3). Jumlah Aparat Linmas	7	Orang
4). Jumlah Pos Keamanan (Polisi)		Unit
5). Jumlah Polisi Hutan		Orang
6). Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran		Unit
7). Jumlah Pos Pemadam Kebakaran		Unit
8). Jumlah Pos Siskamling	140	Unit
9). Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam		Orang
10). Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	578	Orang
12. Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		kasus
13. Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		kasus
14. Jumlah Kejadian Kebakaran		Kasus
15. Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran		Kasus
16. Antar Ormas		Kasus

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Bencana Alam

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Pengungsi Akibat *		
1. Banjir	0	Orang
2. Gunung Meletus		Orang
3. Longsor	0	Orang
4. Gempa		Orang
5. Tsunami		Orang
6. Kebakaran	37	Orang
7. Lainnya	0	Orang
II. Jumlah Lokasi Pengungsian	0	Lokasi
III. Jumlah Pengungsi yang telah kembali ke Lokasi Asal	0	Jiwa
IV. Jumlah pengungsi yang telah direlokasi	0	Jiwa
V. Jumlah Korban Bencana Alam **	0	Jiwa
1. Meninggal	0	Jiwa
2. Hilang	0	Jiwa
3. Luka-luka	0	Jiwa
VI. Jumlah Lokasi Bencana	0	Lokasi
VII. Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	0	Kec
VIII. Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana	0	Rp Juta
IX. Kebutuhan Bantuan *		
1. Dana	0	Rp Juta
2. Beras	0	Ton
3. Mie Instan	0	Kardus
4. Minyak Goreng	0	Liter
5. Obat-obatan	0	Paket
6. Pakaian	0	Paket
7. Material Bangunan	0	Paket
8. Peralatan Tanggap Darurat Bencana	0	Unit
9. Air Bersih	0	Liter
10. Lainnya	0	Paket

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Penyakit Menular

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Manusia *		
1. Sapi Gila	0	Kasus
2. Flu Burung	0	Kasus
3. Chikungunya	0	Kasus
4. Demam berdarah	0	Kasus
5. Hepatitis	0	Kasus
6. Kolera	0	Kasus
7. Malaria	0	Kasus
8. Meningitis	0	Kasus
9. Tuberkulosis	0	Kasus
10. AIDS	0	Kasus
11. HIV	0	Kasus
12. Dikteri	0	Kasus
13. Rabies	0	Kasus
II. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Hewan *		
1. Sapi Gila	0	Kasus
2. Flu Burung	0	Kasus
3. Flu Babi	0	Kasus
4. Anjing Gila	0	Kasus

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pencurian Ikan

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Jumlah Kasus Pencurian Ikan	0	Kasus
II. Jumlah Kapal Pencuri Ikan yang disita	0	Buah
III. Jumlah Lokasi Pencurian Ikan	0	Lokasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Kebakaran Hutan

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Luas Areal Hutan yang Terbakar	o	Ha
II. Jumlah Korban Jiwa	o	Jiwa
III. Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan	o	Lokasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten

Jenis Data

Tahun

Kabupaten Bintan

Pencurian dan

Penyelundupan Kayu

2015

Nama	Nilai	Satuan
I. Volume Kayu yang Dicuri	0	M3
II. Jumlah Kasus	0	Kasus
III. Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup	0	Lokasi



SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan program Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang difokuskan pada pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja pembangunan daerah. Sistem ini dirancang melalui aplikasi online berbasis web, dengan maksud mengumpulkan data dan informasi antar daerah kabupaten/ kota dengan provinsi dan antar daerah provinsi dengan pusat sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 374 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah